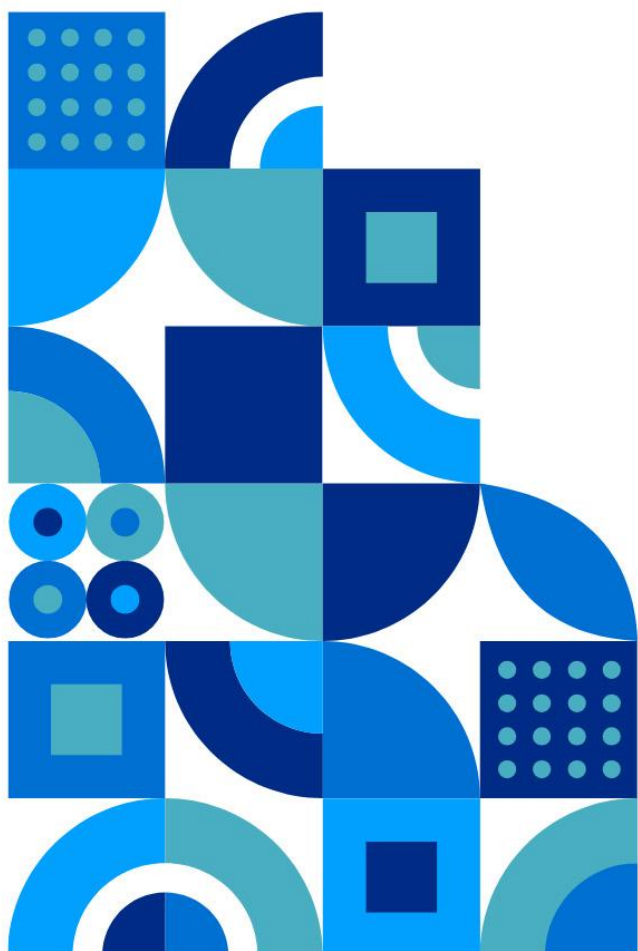




Rancangan Akhir **RENJA** PERANGKAT DAERAH PROVINSI **2026** KALIMANTAN SELATAN

**SEKRETARIAT
DAERAH**



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**


**Geopark
Meratus**

KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan rasa puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya telah disusun Rencana Strategis Perubahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029.

Sesuai Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyiapkan RENSTRA SKPD sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan, Perencanaan Pembangunan Daerah, di mana Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ini disusun dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis baik di lingkungan internal maupun lingkungan eksternal yang saling berpengaruh dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Rencana Strategis ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategi, kebijakan, program, kegiatan serta sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan selama kurun waktu lima tahun ke depan (Tahun 2025-2029) begitu juga dengan indikator pencapaian kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan menjadi dasar bagi penilaian Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada akhir tahun anggaran.

Akhirnya Penyusunan Rencana Strategis Perubahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 ini dapat diselesaikan atas bantuan dan partisipasi semua pihak, dengan ini kami ucapkan terima kasih.

Banjarbaru, 12 September 2025

Sekretaris Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan,



MUHAMMAD SYARIFUDDIN, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19671030 199412 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II.....	8
EVALUASI PELAKSANAAN.....	8
2.1 Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah TA. 2024	Error! Bookmark not defined.
2.2 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah	34
2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	52
2.4 Penelaahan Usulan Program Kegiatan	66
BAB III	68
TUJUAN DAN SASARAN	70
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	70
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah	71
3.3 Rencana Program dan Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah 2026	77
3.4 Sumber Daya Sekretariat Daerah	79
BAB IV	143
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	143
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ..	143
BAB V	146
PENUTUP	146

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai amanat UU No. 25 /2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang Ditindaklanjuti Dengan PP No. 8/2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Amanat UU No. 17/2003 Tentang Negara, yang Ditindaklanjuti dengan PP No. 12/2019 tentang pengelolaan keuangan daerah sebagai pengganti PP Nomor 58/2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam proses usulan perencanaan tahunan, maka setiap Satuan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SPD harus menyusun Dokumen Rencana Kerja–Satuan Perangkat Daerah (RENJA- SPD) serta Rencana Kinerja dan Anggaran-Satuan Perangkat Daerah (RKA-SPD).

Dokumen RENJA-SKPD dan RKA-SKPD ini merupakan dokumen resmi dalam rangka usulan perencanaan yang secara substansi mengacu pada: Visi, Misi dan Program Kerja Gubernur : RPJPD 2025-2045 Tahapan Kedua, Renstra SKPD 2025-2029 dan Tupoksi SPD.

Adapun ruang lingkup Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ini mencakup pelaksanaan kegiatan pada Biro-biro yang tergabung dalam Sekretraiat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dengan mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 dan RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa dalam Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi

daerah dengan berdasar atas asas tugas pembantuan. Pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/wali kota, dibiayai oleh APBN.

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang sebagaimana dimaksud diatas, dilakukan penataan kembali Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka dibentuklah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, disebutkan bahwa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan terdiri atas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum dan kelompok Jabatan Fungsional. 3 (Tiga) Asisten pada Sekretariat Daerah tersebut membawahi 9 (Sembilan) Biro, dan Nomenklatur yang baru Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 062 Tahun 2019 tentang formasi jabatan Pelaksana di lingkungan pemerintah provinsi Kalimantan selatan. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan terdiri atas 3 (tiga) Asisten dan 9 (sembilan) Biro yaitu :

- 1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang terdiri dari 3 Biro yaitu :
 - Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
 - Biro Hukum
 - Biro Kesejahteraan Rakyat
- 2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang terdiri dari 3 Biro yaitu :
 - Biro Perekonomian
 - Biro Pengadaan Barang dan Jasa
 - Biro Administrasi Pembangunan
- 3) Asisten Administrasi Umum yang terdiri dari 3 Biro yaitu :
 - Biro Organisasi
 - Biro Umum

- Biro Administrasi Pimpinan

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah;
2. Koordinasi pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
3. Pembinaan administrasi pemerintahan, hukum dan organisasi;
4. Fasilitasi administrasi perekonomian, kesejahteraan rakyat, hubungan masyarakat;
5. Pengelolaan keuangan Daerah, sarana dan prasarana pemerintah serta rumah tangga; dan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah Daerah.

Sekretariat Daerah merupakan unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Latar Belakang Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 165, Tambahan lembaran Negara Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4483);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 11);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan ke dua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 18);
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
18. Peraturan Dalam Negeri No 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah
19. Perda RPJMD no 2 tahun 2022 tgl 10 Maret 2022, lembaran daerah tahun 2022 nomor 2
20. pergub RENSTRA no. 015 tahun 2022 tanggal 30 maret 2022, berita daerah tahun 2022 nomor 15 tanggal 30 maret 2022

21. Pergub no. 25 Tahun 2024 tanggal 27 Juni 2024 tentang RKPD tahun 2025

Untuk perencanaan program kegiatan pada Renja 2025 ini berpegang pada Undang–undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang–undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dan Undang–undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan pembuatan Renja 2026 ini adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2026, sehingga target dan sasaran kegiatan dapat dicapai sesuai dengan yang telah direncanakan. Renja ini juga dibuat untuk mengoptimalkan peran Sekretariat Daerah Prov. Kalsel sesuai dengan Tupoksi serta mempermudah pelaporan pada akhir masa anggaran 2025, karena menggambarkan rencana capaian kerja pada tahun 2025 dan sebagai tolak ukur perencanaan tahun berikutnya, dan juga terdapat review terhadap Renja tahun sebelumnya.

(Tambahan)

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 berisikan tentang uraian rencana Program Kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026.

BAB I: PENDAHULUAN

BAB II: EVALUASI PELAKSANAAN

BAB III: TUJUAN DAN SASARAN

Berisi Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja OPD, serta Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat Daerah Tahun 2026

**BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH**

Berisi tentang Rencana Kerja serta Pendanaan Kegiatan OPD

BAB V: PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN

Proses penyusunan suatu perencanaan berkaitan erat dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh SKPD dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Pada tahun 2025, Sekretariat daerah yang mengakomodir 9 (sembilan) Biro dengan Program dan Kegiatan masing-masing, yaitu :

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

1. Sekretariat Daerah memiliki 1 (satu) Program dan 7 (Tujuh) kegiatan dan Sub Kegiatan, yaitu :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - d. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 7. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

2. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Pada tahun 2024, pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah memiliki 2 (Dua) Program dan 6 (Enam) kegiatan dan 13 (Tiga Belas) Sub Kegiatan, yaitu :

A. Program Pemerintahan dan Otonomi daerah

- 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Pada SKPD
- 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

B. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

- 1. Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
 - a. Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintah
 - b. Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum
 - c. Fasilitasi Penataan Wilayah
- 2. Pelaksanaan Otonomi Daerah
 - a. Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
 - b. Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan
 - c. Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan
- 3. Fasilitasi Kerjasama Daerah
 - a. Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah
 - b. Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta
 - c. Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama

3 Biro Hukum

Pada tahun 2025, Biro Hukum memiliki 2 (Dua) Program dan 6 (Kegiatan) 13 (Tiga Belas) Sub kegiatan, yaitu:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

- 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
 - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - b. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - c. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

B. Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum

- 1. Fasilitas Penyusunan Perundang - Undangan
 - a. Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Peraturan
 - b. Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Penetapan
 - c. Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya
 - d. Fasilitas dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota
- 2. Fasilitas Bantuan Hukum
 - a. Fasilitas Penyelesaian Masalah Hukum
 - b. Fasilitas Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM

4 Biro Organisasi

Pada tahun 2022, pada DPA Biro Organisasi memiliki 2 (Dua) Program dan 6 (Enam) kegiatan dan 15 (Lima Belas) Sub Kegiatan, yaitu:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

- 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - b. Sosialisasi Peraturan Perundang – Undangan
- 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - b. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - c. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
- 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

B. Program Penataan Organisasi

- 1. Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan
 - a. Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi
 - b. Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota
 - c. Penataan Analisis Jabatan
- 2. Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
 - a. Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
 - b. Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
 - c. Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja
 - d. Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan
 - e. Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik

5 Biro Administrasi Pembangunan

Pada tahun 2024, Biro Administrasi Pembangunan memiliki 2 (Dua) Program dan 8 (Delapan) kegiatan dan 18 (Delapan Belas) Sub Kegiatan, yaitu :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

- 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
 - Daerah 1. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

B. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan

1. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
 - a. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD
 - b. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN
 - c. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah
2. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
 - a. Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah
 - b. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
 - c. Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah

6 Biro Kesejahteraan Rakyat

Pada tahun 2024, Biro Kesejahteraan Rakyat memiliki 2 (Dua) Program dan 5 (Lima) kegiatan, dan 11 (Sebelas) Sub Kegiatan, yaitu:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

B. Program Kesejahteraan Rakyat

1. Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual
 - a. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual
 - b. Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual
2. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
 - a. Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan
 - b. Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan
 - c. Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial
3. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
 - c. Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan

7 Biro Administrasi Pimpinan

Pada tahun 2024, Biro Administrasi Pimpinan memiliki 2 (Dua) Program dan 4 (empat) kegiatan, yaitu:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - b. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah D
 - a. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6. Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan
 - a. Penyiapan Materi Pimpinan
 - b. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
 - c. Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan
7. Fasilitasi Keprotokolan
 - a. Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara
 - b. Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah
 - c. Pengelolaan Hubungan Keprotokolan

8 Biro Umum

Pada tahun 2024, Biro Umum memiliki 1 (Satus) Program dan 8 (Delapan) kegiatan dan 20 (Dua Puluh) Sub Kegiatan, yaitu:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- b. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
- 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - d. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - e. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pengadaan Mebel
 - c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
 - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah

9 Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Pada tahun 2024, pada DPA Biro Pengadaan Barang dan Jasa memiliki 2 (Dua) Program dan 6 (Enam) kegiatan dan 12 (Dua Belas) Sub Kegiatan , yaitu :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - b. Penatausahaan Arsip Dinami Pada SKPD
2. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3. Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air, dan Listrik

B. Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa

1. Pengelolaan barang dan jasa
 - a. Pengelolaan strategi pengadaan barang dan jasa
 - b. Pelaksanaan barang dan jasa
 - c. Pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa
2. Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik
 - a. Pengelolaan system pengadaan secara elektronik
 - b. Pengembangan system informasi pengadaan barang dan jasa

- c. Pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa
- 3. Pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa
 - a. Pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa
 - b. Pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan jasa
 - c. Pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa

10 Biro Perekonomian

Pada tahun 2024, Biro Perekonomian memiliki 2 (Dua) Program dan 3 (Tiga) kegiatan dan 14 (empat Belas) Sub Kegiatan , yaitu :

A. Program Perekonomian Dan Pembangunan

- 1. Pengelolaan Kebijakan Perekonomian
 - a. Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro
 - b. Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro
- 2. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber daya Alam
 - a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
 - b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
 - c. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
- 3. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD
 - a. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha
 - b. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi
 - c. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah

B. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - b. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - c. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lain

Tabel T- C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat
Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026
Provinsi Kalimantan Selatan

Unit Organisasi : SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan dengan tahun 2022(n-1)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021 (n-1)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2022 (n)		Pencapaian Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (berjalan)				
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023(n-2)	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2021 (tahun n)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra			
1	2	3	4		5		6			7		8=(7/6)		9	10=(8+7x9)	11=(10/4)
L	NON URUSAN															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesejahteraan	600	Poin	100	Poin	100	Poin	100	100%	100	Poin	300	Poin		50
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Baik	600	%	100	%	100	%	100	100%	100	%	300	%		50
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	80	Laporan	16	Laporan	16	Laporan	16	Laporan	100%	16	Laporan	48	Laporan	60
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Baik	600	%	100	%	100	%	100	100%	100	%	300	%		50
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.580	Orang	316	Orang	316	Orang	316	Orang	100%	316	Orang	948	Orang	60
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	100%	4	Dokumen	12	Dokumen	60
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	60	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	36	Laporan	60
	Penyusunan Palaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Palaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	60	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	100%	12	Dokumen	36	Dokumen	60
	Administrasi Kepegawainan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawainan Perangkat Daerah Yang Baik	600	%	100	%	100	%	100	100%	100	%	300	%		50
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	60	Paket	12	Paket	12	Paket	12	Paket	100%	12	Paket	36	Paket	60
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Baik	600	%	100	%	100	%	100	100%	100	%	300	%		50
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60	Paket	12	Paket	12	Paket	12	Paket	100%	12	Paket	36	Paket	60
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	Paket	12	Paket	12	Paket	12	Paket	100%	12	Paket	36	Paket	60
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	Paket	12	Paket	12	Paket	12	Paket	100%	12	Paket	36	Paket	60
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	60	Paket	12	Paket	12	Paket	12	Paket	100%	12	Paket	36	Paket	60
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	60	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	100%	12	Dokumen	36	Dokumen	60
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	36	Laporan	60
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Baik	600	%	100	%	100	%	100	100%	100	%	300	%		50
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	36	Laporan	60
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	36	Laporan	60
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	36	Laporan	60
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	36	Laporan	60
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Baik	600	%	100	%	100	%	100	100%	100	%	300	%		50
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Partisipasi Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Partisipasinya	1.000	Unit	200	Unit	200	Unit	200	Unit	100%	200	Unit	600	Unit	60
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	85	Unit	17	Unit	17	Unit	17	Unit	100%	17	Unit	51	Unit	60
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	115	Unit	23	Unit	23	Unit	23	Unit	100%	23	Unit	69	Unit	60
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Baik	600	%	100	%	100	%	100	100%	100	%	300	%		50
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	10	Orang	2	Orang	2	Orang	2	Orang	100%	2	Orang	6	Orang	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 022 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024(n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (berjalan)				
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024(tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)						
4.	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan															
4.01	Sekretariat Daerah															
4.01.06	Program Perekonomian dan Pembangunan	1. Prosentase BUMD yang Sehat 2. Prosentase BLUD yang Baik 3. Tingkat Inflasi yang Stabil	1. 100 2. 100 3. 2,5 ± 1	%	1. 100 2. 100 3. 6,99	%	1. 100 2. 100 3. 0 - ≤3	%	1. 100 2. 100 3. 2,43	%	1. 100 2. 100 3. 100	1. 100 2. 100 3. 2,5 ± 1	%	-	%	-
4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Prosentase Analisis Ekonomi yang ditindaklanjuti	100	%	100	%	100	%	100	%	100	100	%	300	%	75,00
4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Prosentase Analisis Sumber Daya Alam yang ditindaklanjuti	100	%	135,95	%	100	%	147	%	100	100	%	341,21	%	85,30
4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	1. Prosentase BUMD yang Mengimplementasikan Regulasi 2. Prosentase BLUD yang Mengimplementasikan Regulasi	1. 100 2. 100	%	100	%	100	%	100	%	100	100	%	300	%	75,00
X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1. Nilai IKM 2. Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang Dicanangkan	1. 3,5 2. 1	1. Poin 2. Buah	100	%	1. 100 2. 1	1. % 2. Buah	1. 100 2. 1	1. % 2. Buah	100	1. 3,5 2. 1	1. Poin 2. Buah	-	%	-
X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	100	%	100	%	100	%	100	100	%	300	%	75,00
X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	100	%	100	%	100	%	100	100	%	300	%	75,00
X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	100	%	100	%	100	%	100	100	%	300	%	75,00
X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	100	%	100	%	100	%	100	100	%	300	%	75,00

Tabel T- C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat
Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Provinsi Kalimantan Selatan

Unit Organisasi :

Sub Unit Organisasi : Biro Kesejahteraan Rakyat

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022(n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024(n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (berjalan)					
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024(tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)						
1.	Urusan Pemerintahan															
	Fungsi Penunjang Lainnya															
4.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Terhadap layanan Kesekretariatan	600	Point	200	Point	100	Point	100	Point	100	Point	67%			
4.1.1.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kinerja Perangkat Daerah	600	Point	200	Point	100	Point	100	Point	100	Point	67%			
4.1.1.1.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kinerja Sesuai Ketentuan	60	Dok	30	Dok	10	Dok	10	Dok	100	10	Dok	83%		
4.1.1.1.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Secara Berkala Sesuai Ketentuan	6	Dok	2	Dok	1	Dok	1	Dok	100%	1	Dok	67%		
4.1.1.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perangkat Daerah	600	%	200	%	100	%	100	%	100%	100	%	400	%	67%
4.1.1.1.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rakor dan Konsultasi SKPD	72	Bulan	24	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	48	Bulan	67%
4.1.1.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Target Capaian Kinerja Biro	600	%	200	%	100	%	100	%	100%	100	%	400	%	67%
4.1.1.1.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	72	Bulan	24	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	48	Bulan	67%
4.1.4	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Tingkat Kondusifitas Kerukunan Umat Beragama	600	%	200	%	100	%	100	%	100%	100	%	400	%	67%
		Tingkat Kepuasan Masyarakat Bidang Kesra Pelayanan Dasar	600	%	200	%	100	%	100	%	100%	100	%	400	%	67%
		Tingkat Kepuasan Masyarakat Bidang Kesra Non Pelayanan Dasar	600	%	200	%	100	%	100	%	100%	100	%	400	%	67%
		Persentase Saranan Prasana dan Kelembagaan Mental Spiritual Yang Difasilitasi	600	%	200	%	100	%	100	%	100%	100	%	400	%	67%
4.1.4.1	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Jumlah Hibah Yang Di Salurkan Dapat Direalisasikan Fisik/Sesuai Dengan RAB	1200	Objek	401	Objek	200	Objek	200	Objek	100%	211	Objek	902	Objek	76%
4.1.4.1.1	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Laporan Hasil Kesepakatan Rakor Keagamaan Yang Ditindaklanjuti	6	Lap	2	Lap	1	Lap	1	Lap	100%	1	Lap	4	Lap	67%
		Jumlah Laporan Hasil Pertemuan antar dan Inter Umat Beragama Ditindaklanjuti	6	Lap	2	Lap	1	Lap	1	Lap	100%	1	Lap	4	Lap	67%
4.1.4.1.2	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Hibah Yang Di Salurkan Dapat Direalisasikan Fisik/Sesuai Dengan RAB	480	Objek	150	Objek	90	Objek	90	Objek	100%	75	Objek	315	Objek	66%
		Jumlah Kegiatan Keagamaan Yang Penyelenggaraanya Terfasilitasi dan Ditindaklanjuti	42	Keg	14	Keg	7	Keg	7	Keg	100%	7	Keg	28	Keg	67%
4.1.4.2	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persentase Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Kesra Pelayanan Dasar	600	%	20	%	100	%	100	%	100%	100	%	220	%	37%
4.1.4.2.1	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Hasil Fasilitasi SPM Bidang Pendidikan Yang Ditindaklanjuti	6	Lap	2	Lap	1	Lap	1	Lap	100%	1	Lap	4	Lap	67%
		Jumlah Hibah Yang Di Salurkan Dapat Direalisasikan Fisik/Sesuai Dengan RAB	78	Objek	28	Objek	15	Objek	15	Objek	100%	15	Objek	58	Objek	74%
4.1.4.2.2	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Kab/Kota Yang Melaksanakan SPM dan Hasil Monitoring dan Evaluasi Bidang Pendidikan	36	Kab/Kota	12	Kab/Kota	6	Kab/Kota	6	Kab/Kota	100%	6	Kab/Kota	24	Kab/Kota	67%
		Jumlah Hasil Fasilitasi SPM Bidang Kesehatan Yang Ditindaklanjuti	6	Lap	2	Lap	1	Lap	1	Lap	100%	1	Lap	4	Lap	67%
4.1.4.2.3	KegiatanFasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Kab/Kota Yang Melaksanakan SPM dan Hasil Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesehatan	18	Kab/Kota	6	Kab/Kota	3	Kab/Kota	3	Kab/Kota	100%	3	Kab/Kota	12	Kab/Kota	67%
		Jumlah Hasil Fasilitasi SPM Bidang Sosial Yang Ditindaklanjuti	6	Lap	2	Lap	1	Lap	1	Lap	100%	1	Lap	4	Lap	67%
4.1.4.3	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Kab/Kota Yang Melaksanakan SPM dan Hasil Monitoring dan Evaluasi Bidang Sosial	18	Kab/Kota	6	Kab/Kota	3	Kab/Kota	3	Kab/Kota	100%	3	Kab/Kota	12	Kab/Kota	67%
4.1.4.3.1	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesra Non Pelayanan Dasar Yang Terfasilitasi	600	%	200	%	100	%	100	%	100%	100	%	400	%	67%
		Jumlah Hasil Fasilitasi SPM Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	6	Lap	2	Lap	1	Lap	1	Lap	100%	1	Lap	4	Lap	67%
4.1.4.3.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Jumlah Hibah Yang Di Salurkan Dapat Direalisasikan Fisik Sesuai Dengan RAB	78	Objek	18	Objek	13	Objek	10	Objek	77%	13	Objek	41	Objek	53%
		Jumlah Kab/Kota Yang Melaksanakan SPM dan Hasil Monitoring dan Evaluasi Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	12	Kab/Kota	4	Kab/Kota	2	Kab/Kota	2	Kab/Kota	100%	2	Kab/Kota	8	Kab/Kota	67%
4.1.4.3.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Hasil Fasilitasi SPM Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	6	Lap	2	Lap	1	Lap	1	Lap	100%	1	Lap	4	Lap	67%
		Jumlah Kab/Kota Yang Melaksanakan SPM dan Hasil Monitoring dan Evaluasi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	18	Kab/Kota	6	Kab/Kota	3	Kab/Kota	3	Kab/Kota	100%	3	Kab/Kota	12	Kab/Kota	67%
4.1.4.3.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Hasil Fasilitasi SPM Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	6	Lap	2	Lap	1	Lap	1	Lap	100%	1	Lap	4	Lap	67%
		Jumlah Kab/Kota Yang Melaksanakan SPM dan Hasil Monitoring dan Evaluasi Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	18	Kab/Kota	6	Kab/Kota	3	Kab/Kota	3	Kab/Kota	100%	3	Kab/Kota	12	Kab/Kota	67%

Tabel T - C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat
Daerah dan Pencapaian Daerah s/d Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Provinsi Kalimantan Selatan (menggunakan permendagri 13)

Unit Organisasi : Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Sub Unit Organisasi : Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Kode	Uraian / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Outcome) (Rencana) (Rencana) Tahun 2024		Realisasi Target Kinerja Program (Outcome) (Rencana) (Rencana) Tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program (Outcome) (Rencana) (Rencana) Tahun 2024		Target program (Output) (Rencana) (Rencana) Tahun 2024		Pencapaian Realisasi Capaian Target (Rencana) (Rencana) Tahun 2024		Target Capaian (Rencana) (Rencana) Tahun 2024	
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.01.01	NON URUSAN													
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH													
4.01.01.01	Pemerataan, Penggajian dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Pelaksanaan Penggajian dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1000	1000	1000	1000	1000%	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000%
		1. Pelaksanaan Penggajian dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1000	1000	1000	1000	1000%	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000%
		2. Pelaksanaan Penggajian dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1000	1000	1000	1000	1000%	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000%
		3. Pelaksanaan Penggajian dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1000	1000	1000	1000	1000%	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000%
4.01.01.01.01	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah	1000	1000	1000	1000	1000%	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000%
		2. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah	1000	1000	1000	1000	1000%	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000%
4.01.01.01.06	Koordinasi dan Pengawasan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Perangkat Daerah	1. Koordinasi dan Pengawasan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Perangkat Daerah	1000	1000	1000	1000	1000%	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000%
		2. Koordinasi dan Pengawasan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Perangkat Daerah	1000	1000	1000	1000	1000%	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000%
4.01.01.01.09	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1000	1000	1000	1000	1000%	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000%
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1000	1000	1000	1000	1000%	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000%
4.01.01.01.09.03	Pelaksanaan Perencanaan dan Pengawasan/Verifikasi Keuangan	1. Pelaksanaan Perencanaan dan Pengawasan/Verifikasi Keuangan	1000	1000	1000	1000	1000%	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000%
		2. Pelaksanaan Perencanaan dan Pengawasan/Verifikasi Keuangan	1000	1000	1000	1000	1000%	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000%
4.01.01.01.09.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Anggaran APBD	1. Koordinasi dan Pelaksanaan Anggaran APBD	1000	1000	1000	1000	1000%	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000%
		2. Koordinasi dan Pelaksanaan Anggaran APBD	1000	1000	1000	1000	1000%	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000%
4.01.01.01.09.07	Koordinasi dan Pengawasan Laporan Keuangan	1. Koordinasi dan Pengawasan Laporan Keuangan	1000	1000	1000	1000	1000%	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000%
		2. Koordinasi dan Pengawasan Laporan Keuangan	1000	1000	1000	1000	1000%	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000%
4.01.01.01.09	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1000	1000	1000	1000	1000%	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000%
		2. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1000	1000	1000	1000	1000%	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000%
4.01.01.01.09.06	Pelaksanaan Barang Milik Daerah pada APBD	1. Pelaksanaan Barang Milik Daerah pada APBD	1000	1000	1000	1000	1000%	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000%
		2. Pelaksanaan Barang Milik Daerah pada APBD	1000	1000	1000	1000	1000%	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000%
4.01.01.01.09	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1000	1000	1000	1000	1000%	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000%
		2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1000	1000	1000	1000	1000%	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000%
4.01.01.01.09.03	Pelaksanaan dan Pengawasan Administrasi Kepegawaian	1. Pelaksanaan dan Pengawasan Administrasi Kepegawaian	1000	1000	1000	1000	1000%	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000%
		2. Pelaksanaan dan Pengawasan Administrasi Kepegawaian	1000	1000	1000	1000	1000%	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000%
4.01.01.01.09.08	Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran	1. Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran	1000	1000	1000	1000	1000%	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000%
		2. Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran	1000	1000	1000	1000	1000%	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000%
4.01.01.01.09.01	Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran	1. Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran	1000	1000	1000	1000	1000%	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000%
		2. Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran	1000	1000	1000	1000	1000%	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000%
4.01.01.01.09.09	Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran	1. Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran	1000	1000	1000	1000	1000%	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000%
		2. Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran	1000	1000	1000	1000	1000%	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000%
4.01.01.01.09.10	Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran	1. Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran	1000	1000	1000	1000	1000%	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000%
		2. Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran	1000	1000	1000	1000	1000%	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000%
4.01.01.01.09.11	Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran	1. Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran	1000	1000	1000	1000	1000%	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000%
		2. Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran	1000	1000	1000	1000	1000%	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000%
4.01.01.01.09.12	Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran	1. Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran	1000	1000	1000	1000	1000%	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000%
		2. Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran	1000	1000	1000	1000	1000%	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000%

LETTER FROM THE EDITOR : SHERIDAN STANLEY STANLEY

25

Tabel T - C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat
Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Selatan (menggunakan permendagri 13)

Unit Organisasi : Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Sub Unit Organisasi : Biro Administrasi Pembangunan

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (berjalan)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Urusan Rutin									
	Bidang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100 point	20 point	20 point	20 point	100%	20 point	60 point	60%
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dan sesuai aturan	100 %	20 %	20 %	20 %	100%	20 %	60 %	60%
4.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 lap	1 lap	1 lap	1 lap	100%	1 lap	3 lap	75%
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	100 %	20 %	20 %	20 %	100%	20 %	60 %	60%
4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	3 paket	75%
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 lap	1 lap	1 lap	1 lap	100%	1 lap	3 lap	75%
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	20 %	20 %	20 %	100%	20 %	60 %	60%
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 lap	1 lap	1 lap	1 lap	100%	1 lap	3 lap	75%
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	20 %	20 %	20 %	100%	20 %	60 %	60%
4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	140 unit	N/A	35 unit	35 unit	100%	23 unit	58 unit	41%
	Urusan Non Rutin									
	Bidang Unsur Pendukung Urusan Pemerintah									
04.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase Permasalahan Pembangunan Daerah yang dapat Diselesaikan	95 %	19 %	19 %	19 %	100%	19 %	57 %	60%
4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Rekomendasi masalah pelaksanaan pembangunan daerah sumber dana APBD dan APBN yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	100 %	20 %	20 %	20 %	100%	20 %	60 %	60%
		Persentase Rekomendasi masalah pelaksanaan pembangunan wilayah yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	100 %	20 %	20 %	20 %	100%	20 %	60 %	60%
		Jumlah Laporan hasil Pengendalian Administrasi pelaksanaan pembangunan Wilayah	4 lap	N/A	1 lap	1 lap	100%	1 lap	2 lap	50%
4.01.08.1.01.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	4 lap	N/A	1 lap	1 lap	100%	1 lap	2 lap	50%
4.01.08.1.01.02	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah SKPD yang di Analisis Permasalahan Pembangunan Sumber Dana APBD	196 skpd	N/A	49 skpd	49 skpd	100%	49 skpd	98 skpd	50%
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	4 lap	N/A	1 lap	1 lap	100%	1 lap	2 lap	50%
4.01.08.1.01.02	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah SKPD yang di Analisis Permasalahan Pembangunan Sumber Dana APBN	84 skpd	N/A	21 skpd	21 skpd	100%	21 skpd	42 skpd	50%
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	12 lap	N/A	3 lap	3 lap	100%	3 lap	6 lap	50%
4.01.08.1.01.03	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Kab/Kota Wilayah I, II dan III yang di Analisis Permasalahan Pembangunan	52 kab/kota	N/A	13 kab/kota	13 kab/kota	100%	13 kab/kota	26 kab/kota	50%
4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Meningkatnya Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100 %	25 %	25 %	25 %	100%	25 %	75 %	75%
4.01.08.1.02.01	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	12 dok	N/A	4 dok	4 dok	100%	1 dok	5 dok	42%
4.01.08.1.02.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	4 lap	N/A	1 lap	1 lap	N/A	1 lap	1 lap	25%
4.01.08.1.02.03	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah	4 dok	N/A	1 dok	1 dok	N/A	1 dok	2 dok	50%
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	4 dok	N/A	1 dok	1 dok	N/A	1 dok	2 dok	50%

Tabel T- C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat
Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Provinsi Kalimantan Selatan (menggunakan permendagri 13)

Unit Organisasi : Sekretariat Daerah Prov. Kalsel
Sub Unit Organisasi : Biro Administrasi Pimpinan

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024(n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (berjalan)				
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024(tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6			7	8=(7/6)		9	10=(5+7+9)		11=(10/4)
1. Urusan Pemerintahan														
4.01. Fungsi Penunjang Lainnya														
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Kesekretariatan	100%	100%	100	point	0	point	100.00	100	point	100	point	100.00
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Baik	72 dokumen	24 dokumen	100	%	100	%	100.00	100	%	100	%	100.00
4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan	100%	100%	42	Laporan	21	Laporan	100.00	45	Laporan	45	Laporan	100.00
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Baik	10.560 tayang	3.500 tayang	100	%	100	%	100.00	100	%	100	%	100.00
4.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8.885 dokumen	2.945 kegiatan	24	Laporan	12	Dokumen	100.00	24	bulan	24	bulan	100.00
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Baik	3.240 kegiatan	1.060 kegiatan	100	%	100	%	100.00	100	%	100	%	100.00
4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan yang disediakan	72 dokumen	24 dokumen	6	Paket	6	Paket	100.00	6	Paket	6	Paket	100.00
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	100%	12	Laporan	12	Laporan	100.00	12	bulan	12	bulan	100.00
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Baik	10.560 tayang	3.500 tayang	100	%	100	%	100.00	100	%	100	%	100.00
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8.885 dokumen	2.945 kegiatan	12	Laporan	12	Laporan	100.00	12	bulan	12	bulan	100.00
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Baik	3.240 kegiatan	1.060 kegiatan	100	%	100	%	100.00	100	%	100	%	100.00
4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	72 dokumen	24 dokumen	7	Unit	7	Unit	100.00	9	Unit	9	Unit	100.00
4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Meningkatnya Kualitas Bahan Materi dan Komunikasi Pimpinan	100%	100%	100	%	100	%	100.00	100	%	100	%	100.00
4.01.01.1.13.01	Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	10.560 tayang	3.500 tayang	12	Dokumen	12	Dokumen	100.00	12	Dokumen	12	Dokumen	100.00
4.01.01.1.13.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	8.885 dokumen	2.945 kegiatan	12	Laporan	12	Laporan	100.00	12	Laporan	12	Laporan	100.00
4.01.01.1.13.03	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	3.240 kegiatan	1.060 kegiatan	12	Laporan	12	Laporan	100.00	12	Laporan	12	Laporan	100.00
4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	Persentase Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Keprotokolan	100%	100%	100	%	100	%	100.00	100	%	100	%	100.00
4.01.01.1.14.01	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	10.560 tayang	3.500 tayang	12	Laporan	12	Laporan	100.00	12	Laporan	12	Laporan	100.00
4.01.01.1.14.02	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8.885 dokumen	2.945 kegiatan	12	Laporan	12	Laporan	100.00	12	Laporan	12	Laporan	100.00
4.01.01.1.14.03	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	3.240 kegiatan	1.060 kegiatan	12	Laporan	12	Laporan	100.00	12	Laporan	12	Laporan	100.00

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat
Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Provinsi Kalimantan Selatan (menggunakan permendagri 13)**

Unit Organisasi : **SEKRETARIAT DAERAH**

Sub Unit Organisasi : **BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**

Kode	Usuran / Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022(n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021 (n-1)	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023(n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)	Pencapaian Kumulasi Capaian Target Renstra	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1.	KONTRIBUSI		%	%	%	%	%	10-15-7-35	11-(10/1)							
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Kesekretariatan	100	Point	20	Point	20	Point	100%	20	Point	60	Point	60		
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang baik	100	%	20	%	20	%	20	%	30%	20	%	60		
4.01.01.4.01.01.00101.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	100%	4	Dokumen	12	Laporan	60		
4.01.01.4.01.01.00101.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	60%	4	Laporan	12	Laporan	60		
4.01.01.1.08	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang baik	300	%	60	%	60	%	60	%	60%	60	%	180	%	60
4.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	2	Paket	2	Paket	60%	2	Paket	8	Paket	67		
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	60%	2	Laporan	8	Laporan	67		
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang baik	100	%	20	%	20	%	20	%	20%	60	%	60	%	60
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	Laporan	10	Laporan	12	Laporan	20	Laporan	60%	12	Laporan	32	Laporan	67
4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	1.Persentase Potensi Kerja Sama yang direalisasikan	75%	%	15	%	15	%	15	%	60%	15	%	60	%	60
		2. Status LPDP Provinsi Kalimantan Selatan	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
		3.Persentase Bidang Pemerintahan yang ditindaklanjuti stakeholders	100%	%	20	%	20	%	20	%	60%	60	%	60	%	60%
		4. Nilai SKM/IKM	80	Point	15	Point	15	Point	15	Point	60	Point	60	Point	60	60%
		5. Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan, dan Kerja Sama Daerah dengan tingkat capaian hasil Outcome (100%)	100%	%	20	%	20	%	20	%	60%	60	%	60	%	60%
		6. Inovasi Biro Pemerintahan yang ditindaklanjuti	1	Inovasi	-	Inovasi	-	Inovasi	-	Inovasi	-	Inovasi	-	Inovasi	1 Inovasi	1 Inovasi
4.01.03.01.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan.	1.Persentase Kabupaten yang terbit Administrasi Penataan Wilayah	100	%	20	%	20	%	20	%	60%	60	%	60	%	60
		2. Persentase Penyelesaian Permasalahan Bidang Pemerintahan	100%	%	20	%	20	%	20	%	60%	60	%	60	%	60%
		3.Rekomendasi Bidang Pemerintahan yang ditindaklanjuti	100%	%	20	%	20	%	20	%	60%	60	%	60	%	60%
4.01.01.4.01.01.00103.01.01	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan.	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	12	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	60%	2	Dokumen	6	Dokumen	60
4.01.01.4.01.01.00103.01.02	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum.	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pemerintahan Umum	3	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	60%	1	Dokumen	3	Dokumen	60
4.01.01.4.01.01.00103.01.03	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Wilayah	10	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	60%	2	Dokumen	6	Dokumen	60
4.01.03.01.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah.	1.Persentase Potensi Kerja Sama yang direalisasikan	100%	%	20	%	20	%	20	%	60%	60	%	60	%	60%
		2. Status LPDP Provinsi Kalimantan Selatan	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
		3.Persentase Bidang Pemerintahan yang ditindaklanjuti stakeholders	100%	%	20	%	20	%	20	%	60%	60	%	60	%	60%
		4. Nilai SKM/IKM	80	Point	15	Point	15	Point	15	Point	60	Point	60	Point	60	60%
		5. Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan, dan Kerja Sama Daerah dengan tingkat capaian hasil Outcome (100%)	100%	%	20	%	20	%	20	%	60%	60	%	60	%	60%
		6. Inovasi Biro Pemerintahan yang ditindaklanjuti	1%	Inovasi	-	Inovasi	-	Inovasi	-	Inovasi	-	Inovasi	-	Inovasi	1 Inovasi	1 Inovasi
4.01.01.4.01.01.00103.02.01	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	10	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	60%	2	Dokumen	6	Dokumen	60
4.01.01.4.01.01.00103.02.02	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	10	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	60%	2	Dokumen	6	Dokumen	60
4.01.01.4.01.01.00103.02.03	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan.	Jumlah Hasil Laporan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	10	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	60%	2	Laporan	6	Laporan	60
4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerjasama Daerah.	Rekomendasi Bidang Kerja Sama yang diselesaikan.	300	%	60	%	60	%	60	%	60%	60	%	180	%	60
4.01.01.4.01.01.00103.03.01	Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah.	Jumlah Kerja Sama antar Pemerintah yang di Fasilitasi	270	Dokumen	54	Dokumen	54	Dokumen	54	Dokumen	60%	54	Dokumen	54	Dokumen	60
4.01.01.4.01.01.00103.03.02	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta.	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang di Fasilitasi	200	Dokumen	40	Dokumen	40	Dokumen	40	Dokumen	60%	40	Dokumen	120	Dokumen	60
4.01.01.4.01.01.00103.03.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama.	Jumlah Kerja Sama yang di Evaluasi	10	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	60%	2	Laporan	6	Laporan	60

Banjarbaru, 13 Februari 2023
Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah,

THAUFIK HIDAYAT
Pembina Utama Muda
NIP.19720621 199101 1 001

29

Tabel T- C.29

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat
Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan (menggunakan permendagri 13)**

Unit Organisasi : Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2030	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (berjalan)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Capaian Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
4.01	SEKRETARIAT DAERAH									
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan								
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.01.01.1.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dok	12 dok	2 dok	2 dok	2 dok	6 dok	6 dok	6 dok
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.01.01.1.02.08	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir TahunYang Sesuai Ketentuan	8 dok	1 dok	12 dok	12 dok	12 dok	6 dok	6 dok	6 dok
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.01.01.1.05.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	240 stell	116 Lembar	120 stell	120 stell	120 stell	240 stell	240 stell	240 stell
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kepuasan terhadap layanan Kesekretariatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.01.01.1.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya BBM untuk Kendaraan Dinas Operasional (Biro Pengadaan Barang dan Jasa)	1.000 L	965 Ltr	752 L	752 L	752 L	-	-	-
4.01.01.1.06.10	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen kinerja dan penatausahaan perencanaan, keuangan dan kepegawaian yang disusun	12 dok	1 dok	12 dok	12 dok	12 dok	12 dok	12 dok	12 dok
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.01.01.1.07.06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa	60 unit/buah	10 unit/buah	33 unit	33 unit	33 unit	64 unit/buah	64 unit/buah	64 unit/buah
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Kegiatan penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik (Biro Pengadaan Barang dan Jasa)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.01.01.1.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya Rekening Jasa Komunikasi/ Internet Tiap Bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan

4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa; Predikat Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa; Rasio Nilai Belanja yang dilakukan melalui Pengadaan Nilai Indeks Kepuasan Pengguna Layanan PBJ	Level 3+ 75(baik) ; 25 % 87	Level 3+ 0 54.38% 99.	0 75 (Baik) 25% 87	0 90.21 59.91% 99.83	0 90.21 59.91% 99.83	0 85 25% 87	0 85 25% 87	0 85 25% 87
4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase proses PBJ Prov.Kalsel yang sesuai ketentuan perundang-undangan dan tepat waktu; Persentase pengadaan barang dan jasa dengan hasil evaluasi bebas mark up;	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%
4.01.07.1.01.01	Pengelolaan strategi pengadaan barang dan jasa	Jumlah laporan hasil strategi pengadaan barang dan jasa;	12 laporan	2 lap	2 lap	2 lap	2 lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap
4.01.07.1.01.02	Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	12 Laporan	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	12 Lap
4.01.07.1.01.03	Pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa;	12 Laporan	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap
4.01.07.1.02	Pengadaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase pemenuhan LPSE sesuai peraturan perundang-undangan; Rasio gangguan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang dapat diselesaikan	100% 0.8	100% 0.8	100% 0.8	100% 0.8	100% 0.8	100% 0.8	100% 0.8	100% 0.8
4.01.07.1.02.01	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah laporan pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik	12 Laporan	12 Laporan ;	12 Laporan ;	12 Laporan ;	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
4.01.07.1.02.02	Pengembangan sistem informasi pengadaan barang dan jasa	Jumlah laporan pengembangan sistem informasi pengadaan barang dan jasa	12 Laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
4.01.07.1.02.03	Pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa	Jumlah laporan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa	12 Laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase ketersediaan SDM Pengadaan Barang dan Jasa yang berkualitas dan bersertifikat PBJ; Persentase pelayanan administrasi Tata usaha Biro; Persentase Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) provinsi, kabupaten/kota dengan tingkat kematangan minimal Level 3; Presentase terpenuhinya layanan permasalahan pengadaan barang dan jasa	100% ; 100%; 55.55% ; 100%	86.67% 0 21.43% ; 100%	57.14% ; 100% 18.18% 100%	97.56% ; 100% 45.45% 100%	97.56% ; 100% 45.45% 100%	66.67% ; 100% 30% 100%	66.67% ; 100% 30% 100%	66.67% ; 100% 30% 100%
4.01.07.1.03.01	Pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa	30 org	5 orang	25 org	39 org	100%	40 org	40 org	40 org
4.01.07.1.03.02	Pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan jasa	Jumlah laporan hasil penataan kelembagaan pengadaan barang dan jasa	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
4.01.07.1.03.03	Pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan

2.2 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Acuan dalam menganalisis kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja dapat menggunakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar, dan IKU (Indikator Kinerja Utama). Capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, Keberhasilan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat dari pencapaian indikator dan yang telah ditetapkan. Hasil keberhasilan kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada Tabel 2.2 (Tabel.T-C.30 Lampiran Permendagri No 86 Tahun 2017) berikut ini

Tujuan Pembangunan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat daerah Kalimantan Selatan, sehingga mewujudkan visi masyarakat ***“KALSEL BEKERJA”***. Untuk meningkatkan kualitas pembangunan yang diarahkan untuk mendukung terwujudnya masyarakat Kalimantan Selatan yang berkembang, maju, unggul, nyaman, sejahtera dan damai tersebut, sangat dipengaruhi pula oleh perubahan-perubahan lingkungan strategis internal maupun eksternal dalam skala regional, nasional dan internasional.

Perubahan-perubahan lingkungan strategis internal maupun eksternal dalam skala regional, nasional dan internasional tersebut saling terkait memberikan pengaruh terhadap Rencana Strategis (RENSTRA) dan orientasi pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029.

Tabel T- C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Unit Organisasi :

Sub Unit Organisasi : Biro Kesejahteraan Rakyat

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (n - 2)	Tahun 2024 (n - 1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n + 1)	Tahun 2023 (n - 2)	Tahun 2024 (n - 1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n + 1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1. Indikator Kinerja Kunci												
1												
2												
3												
4	dst.....											
2. Indikator Kinerja PD												
1	Tingkat Kondusifitas Kerukunan Umat Beragama			73.32	73.85	74.3	74.7	73.53		74.5	74.6	
2	Persentase Peningkatan Pengumpulan ZIS dari Badan Amil Zakat (BAZNAS)			10%	30%	35%	40%	80%		80%	82%	
3	Nilam IKM			86	88	90	91	90.76		91	92	
4	Jumlah Inovasi Yang Dicanangkan			1	1	1	1	1		1	1	

Tabel T- C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Unit Organisasi : SEKRETARIAT DAERAH
 Sub Unit Organisasi : BIRO HUKUM

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	RK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (n - 2)	Tahun 2024 (n - 1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n + 1)	Tahun 2023 (n - 2)	Tahun 2024 (n - 1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n + 1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1. Indikator Kinerja Kunci												
1												
2												
3	Dit....											
2. Indikator Kinerja PD												
1	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Keresiderbitan			100 Point	101 Point	102 Point	103 Point	104 Point	105 Point	106 Point	107 Point	Indikator Sub Kegiatan Hanya Dipakai Pada Tahun 2021, Sedangkan Untuk Tahun Berikutnya Menyesuaikan Dengan Indikator Sub Kegiatan Yang Telah Termaktub Dalam Keppmendagri No.050-5889 Tahun 2021 Sesuai Arahian Dari Bappeda
2	Persentase Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Baik			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sub Kegiatan Hanya Dipakai Pada Tahun 2022, Sedangkan Untuk Tahun Berikutnya Menyesuaikan Dengan Indikator Sub Kegiatan Yang Telah Termaktub Dalam Keppmendagri No.050-5889 Tahun 2021 Sesuai Arahian Dari Bappeda
3	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	5 Dokumen	3 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	Indikator Sub Kegiatan Baru Menyesuaikan Dengan Keppmendagri No.050-5889 Tahun 2021 Sesuai Arahian Dari Bappeda
4	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD			3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Indikator Sub Kegiatan Baru Menyesuaikan Dengan Keppmendagri No.050-5889 Tahun 2021 Sesuai Arahian Dari Bappeda
5	Persentase Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Baik			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sub Kegiatan Hanya Dipakai Pada Tahun 2021, Sedangkan Untuk Tahun Berikutnya Menyesuaikan Dengan Indikator Sub Kegiatan Yang Telah Termaktub Dalam Keppmendagri No.050-5889 Tahun 2021 Sesuai Arahian Dari Bappeda
6	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD			4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Indikator Sub Kegiatan Baru Menyesuaikan Dengan Keppmendagri No.050-5889 Tahun 2021 Sesuai Arahian Dari Bappeda
7	Persentase Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Baik			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sub Kegiatan Hanya Dipakai Pada Tahun 2021, Sedangkan Untuk Tahun Berikutnya Menyesuaikan Dengan Indikator Sub Kegiatan Yang Telah Termaktub Dalam Keppmendagri No.050-5889 Tahun 2021 Sesuai Arahian Dari Bappeda
8	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	Indikator Sub Kegiatan Baru Menyesuaikan Dengan Keppmendagri No.050-5889 Tahun 2021 Sesuai Arahian Dari Bappeda
9	Jumlah Paket Barang Cetakn Dan Penggandaan Yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	Indikator Sub Kegiatan Baru Menyesuaikan Dengan Keppmendagri No.050-5889 Tahun 2021 Sesuai Arahian Dari Bappeda
10	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Indikator Sub Kegiatan Baru Menyesuaikan Dengan Keppmendagri No.050-5889 Tahun 2021 Sesuai Arahian Dari Bappeda
	Persentase Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah Yang Baik			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sub Kegiatan Hanya Dipakai Pada Tahun 2021, Sedangkan Untuk Tahun Berikutnya Menyesuaikan Dengan Indikator Sub Kegiatan Yang Telah Termaktub Dalam Keppmendagri No.050-5889 Tahun 2021 Sesuai Arahian Dari Bappeda
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Indikator Sub Kegiatan Baru Menyesuaikan Dengan Keppmendagri No.050-5889 Tahun 2021 Sesuai Arahian Dari Bappeda
	Persentase Kualitas Produk Hukum Daerah Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan Yang Dimanfaatkan Pemerintah Daerah;			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sub Kegiatan Hanya Dipakai Pada Tahun 2021, Sedangkan Untuk Tahun Berikutnya Menyesuaikan Dengan Indikator Sub Kegiatan Yang Telah Termaktub Dalam Keppmendagri No.050-5889 Tahun 2021 Sesuai Arahian Dari Bappeda
	Persentase Keberhasilan Pendampingan Bantuan/Layanan Hukum (Litigasi & Non Litigasi) Pemerintah Daerah Dan Layanan Informasi Produk Hukum Yang Baik;			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sub Kegiatan Hanya Dipakai Pada Tahun 2021, Sedangkan Untuk Tahun Berikutnya Menyesuaikan Dengan Indikator Sub Kegiatan Yang Telah Termaktub Dalam Keppmendagri No.050-5889 Tahun 2021 Sesuai Arahian Dari Bappeda
	Persentase Peraturan Perundang-Undangan Provinsi Dan Peraturan Penundang-Undangan Kabupaten/Kota Yang Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan;			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sub Kegiatan Hanya Dipakai Pada Tahun 2021, Sedangkan Untuk Tahun Berikutnya Menyesuaikan Dengan Indikator Sub Kegiatan Yang Telah Termaktub Dalam Keppmendagri No.050-5889 Tahun 2021 Sesuai Arahian Dari Bappeda
	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Informasi Bidang Hukum Dan/Atau Produk Hukum Daerah Yang Diberikan Dengan Baik;			100 Point	101 Point	102 Point	103 Point	104 Point	105 Point	106 Point	107 Point	Indikator Sub Kegiatan Hanya Dipakai Pada Tahun 2021, Sedangkan Untuk Tahun Berikutnya Menyesuaikan Dengan Indikator Sub Kegiatan Yang Telah Termaktub Dalam Keppmendagri No.050-5889 Tahun 2021 Sesuai Arahian Dari Bappeda
	Jumlah Poduk Hukum Pengaturan Yang Disusun			60 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	Indikator Sub Kegiatan Baru Menyesuaikan Dengan Keppmendagri No.050-5889 Tahun 2021 Sesuai Arahian Dari Bappeda
	Jumlah Produk Hukum Penetapan Yang Disusun			500 Dokumen	500 Dokumen	500 Dokumen	500 Dokumen	500 Dokumen	500 Dokumen	500 Dokumen	500 Dokumen	Indikator Sub Kegiatan Baru Menyesuaikan Dengan Keppmendagri No.050-5889 Tahun 2021 Sesuai Arahian Dari Bappeda
	Jumlah Produk Hukum Yang Diddokumentasi Dan Dikeola Informasi Hukumnya			560 Dokumen	560 Dokumen	560 Dokumen	560 Dokumen	560 Dokumen	560 Dokumen	560 Dokumen	560 Dokumen	Indikator Sub Kegiatan Baru Menyesuaikan Dengan Keppmendagri No.050-5889 Tahun 2021 Sesuai Arahian Dari Bappeda
	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota Yang Difasilitasi Dan Dievaluasi			130 Dokumen	130 Dokumen	130 Dokumen	130 Dokumen	130 Dokumen	130 Dokumen	130 Dokumen	130 Dokumen	Indikator Sub Kegiatan Baru Menyesuaikan Dengan Keppmendagri No.050-5889 Tahun 2021 Sesuai Arahian Dari Bappeda
	Persentase Tereaksalnnya Bantuan/Layanan Hukum Litigasi dan/atau Non Litigasi Pemerintah Daerah Dengan Baik			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sub Kegiatan Hanya Dipakai Pada Tahun 2021, Sedangkan Untuk Tahun Berikutnya Menyesuaikan Dengan Indikator Sub Kegiatan Yang Telah Termaktub Dalam Keppmendagri No.050-5889 Tahun 2021 Sesuai Arahian Dari Bappeda
	Persentase Terpenuhinya PS HAM Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Dengan Baik			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sub Kegiatan Hanya Dipakai Pada Tahun 2021, Sedangkan Untuk Tahun Berikutnya Menyesuaikan Dengan Indikator Sub Kegiatan Yang Telah Termaktub Dalam Keppmendagri No.050-5889 Tahun 2021 Sesuai Arahian Dari Bappeda
	Jumlah Masalah Hukum Yang Diselesaikan			12 Kasus	12 Kasus	12 Kasus	12 Kasus	12 Kasus	12 Kasus	12 Kasus	12 Kasus	Indikator Sub Kegiatan Baru Menyesuaikan Dengan Keppmendagri No.050-5889 Tahun 2021 Sesuai Arahian Dari Bappeda
	Jumlah Masalah Non Litigasi Dan HAM Yang Diselesaikan			12 Kasus	12 Kasus	12 Kasus	12 Kasus	12 Kasus	12 Kasus	12 Kasus	12 Kasus	Indikator Sub Kegiatan Baru Menyesuaikan Dengan Keppmendagri No.050-5889 Tahun 2021 Sesuai Arahian Dari Bappeda

Tabel T- C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Unit Organisasi : Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Sub Unit Organisasi : Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

N o	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (n - 2)	Tahun 2023 (n - 1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n + 1)	Tahun 2022 (n - 2)	Tahun 2023 (n - 1)	Tahun 2023 (n)	Tahun 2024 (n + 1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			-	100%	100%	100%	-		100%	100%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
	1 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
	2 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
	3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
	1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
	1 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
	2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
	2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
	3 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
	4 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
	5 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
	1 Pengadaan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
	2 Pengadaan Mebel			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
	3 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
	1 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
	1 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
	2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
	3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
	4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	

Tabel T- C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Unit Organisasi : Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Sub Unit Organisasi : Biro Administrasi Pembangunan												
No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (n - 2)	Tahun 2024 (n - 1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n + 1)	Tahun 2023 (n - 2)	Tahun 2024 (n - 1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n + 1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Indikator Kinerja Kunci											
1												
2												
3												
4	dst.....											
2.	Indikator Kinerja PD											
1	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan			100 point	100 point	100 point	100 point	100 point	-	100 point	100 point	Indikator eselon II untuk kegiatan rutin
2	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dan sesuai aturan			100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	Indikator eselon III untuk kegiatan rutin
3	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	Indikator eselon IV menyesuaikan dengan Kepmendagri nomor 050-5889 Tahun 2021 sesuai arahan dari Bappeda
4	Persentase Sarana dan Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat			100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	Indikator eselon III untuk kegiatan rutin
5	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	-	1 Paket	1 Paket	Indikator eselon IV menyesuaikan dengan Kepmendagri nomor 050-5889 Tahun 2021 sesuai arahan dari Bappeda
6	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	Indikator eselon IV menyesuaikan dengan Kepmendagri nomor 050-5889 Tahun 2021 sesuai arahan dari Bappeda
7	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	-	-	-	1 Paket	-	-	-	Sub keg yang memakai indikator ini hanya digunakan pada tahun 2023 sedangkan di tahun selanjutnya tidak digunakan lagi karena tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD
8	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	Indikator eselon III untuk kegiatan rutin
9	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	Indikator eselon IV menyesuaikan dengan Kepmendagri nomor 050-5889 Tahun 2021 sesuai arahan dari Bappeda
10	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	Indikator eselon III untuk kegiatan rutin
11	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			35 unit	23 unit	30 unit	35 unit	35 unit	-	30 unit	35 unit	Indikator eselon IV menyesuaikan dengan Kepmendagri nomor 050-5889 Tahun 2021 sesuai arahan dari Bappeda
12	Persentase Permasalahan Pembangunan Daerah yang dapat Diselesaikan			50%	65%	80%	95%	50%	-	80%	95%	Indikator eselon II untuk kegiatan non rutin
13	Persentase Rekomendasi masalah pelaksanaan pembangunan daerah sumber dana APBD dan APBN yang ditindaklanjuti oleh stakeholder			100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	Indikator eselon III untuk kegiatan non rutin
14	Persentase Rekomendasi masalah pelaksanaan pembangunan wilayah yang ditindaklanjuti oleh stakeholder			100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	Indikator eselon III untuk kegiatan non rutin
15	Jumlah Laporan hasil Pengendalian Administrasi pelaksanaan pembangunan Wilayah			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	Indikator eselon III untuk kegiatan non rutin
16	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	Indikator eselon IV menyesuaikan dengan Kepmendagri nomor 050-5889 Tahun 2021 sesuai arahan dari Bappeda
17	Jumlah SKPD yang di Analisis Permasalahan Pembangunan Sumber Dana APBD			49 skpd	49 skpd	49 skpd	49 skpd	49 skpd	-	49 skpd	49 skpd	Indikator eselon IV menyesuaikan dengan cascading (pohon kinerja) sesuai arahan dari Biro Organisasi
18	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	Indikator eselon IV menyesuaikan dengan Kepmendagri nomor 050-5889 Tahun 2021 sesuai arahan dari Bappeda
19	Jumlah SKPD yang di Analisis Permasalahan Pembangunan Sumber Dana APBN			21 skpd	21 skpd	21 skpd	21 skpd	21 skpd	-	21 skpd	21 skpd	Indikator eselon IV menyesuaikan dengan cascading (pohon kinerja) sesuai arahan dari Biro Organisasi
20	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah			3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	-	3 Laporan	3 Laporan	Indikator eselon IV menyesuaikan dengan Kepmendagri nomor 050-5889 Tahun 2021 sesuai arahan dari Bappeda
21	Jumlah Kab/ Kota Wilayah I, II dan III yang di Analisis Permasalahan Pembangunan			13 kab/kota	13 kab/kota	13 kab/kota	13 kab/kota	13 kab/kota	-	13 kab/kota	13 kab/kota	Indikator eselon IV menyesuaikan dengan cascading (pohon kinerja) sesuai arahan dari Biro Organisasi
22	Persentase Meningkatnya Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	Indikator eselon III untuk kegiatan non rutin
23	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan			4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	-	4 dok	4 dok	Indikator eselon IV menyesuaikan dengan Kepmendagri nomor 050-5889 Tahun 2021 sesuai arahan dari Bappeda
24	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	Indikator eselon IV menyesuaikan dengan Kepmendagri nomor 050-5889 Tahun 2021 sesuai arahan dari Bappeda
25	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah			1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	-	1 dok	1 dok	Indikator eselon IV menyesuaikan dengan Kepmendagri nomor 050-5889 Tahun 2021 sesuai arahan dari Bappeda
26	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah			1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	-	1 dok	1 dok	Indikator eselon IV menyesuaikan dengan cascading (pohon kinerja) sesuai arahan dari Biro Organisasi

Tabel TC 30
Capaian Kinerja Perangkat Daerah
Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (n - 2)	Tahun 2024 (n - 1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n + 1)	Tahun 2020 (n - 2)	Tahun 2021 (n - 1)	Tahun 2022 (n)	Tahun 2023 (n + 1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.	Indikator Kinerja PD											
	Program : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Indikator : Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Kesekretariatan			100	100	100	100		100	100	100	
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah indikator: Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Baik			100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	
	Subkegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD indikator: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Subkegiatan: Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			42 Laporan	45 Laporan	45 Laporan	45 Laporan		12 Bulan	45 Laporan	42 Laporan	
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah indikator: Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Baik			100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	
	Subkegiatan: Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN indikator: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen		12 Bulan	24 Dokumen	24 Dokumen	
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah indikator: Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Baik			100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	
	Subkegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor indikator: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan yang disediakan			6 Paket	6 Paket	30 Paket	30 Paket		12 Bulan	30 Paket	6 Paket	
	Subkegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD indikator: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan		12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan	
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah indikator: Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Baik			100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	
	Subkegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor indikator: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan		12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan	
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah indikator: Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Baik			100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	
	Subkegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin dan Lainnya indikator: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			10 Unit	11 Unit	14 Unit	15 Unit		12 Bulan	15 Unit	10 Unit	
	Kegiatan : Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan indikator: Persentase Meningkatnya Kualitas Bahan Materi dan Komunikasi Pimpinan			100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	
	Subkegiatan: Penyajian Materi Pimpinan indikator: Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan			12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen		365 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	
	Subkegiatan: Fasilitas Komunikasi Pimpinan indikator: Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan			12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan		740 Dokumen	12 Laporan	12 Laporan	
	Subkegiatan: Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan indikator: Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan			12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan		4250 Tayang	12 Laporan	12 Laporan	
	Kegiatan : Fasilitas Keprotokolan indikator: Persentase Meningkatnya Kualitas Fasilitas Keprotokolan			100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	
	Subkegiatan: Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara indikator: Jumlah Laporan Hasil Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara			12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan		325 Kegiatan	12 Laporan	12 Laporan	
	Subkegiatan: Fasilitas Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah indikator: Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan		300 Kegiatan	12 Laporan	12 Laporan	
	Subkegiatan: Pengelolaan Hubungan Keprotokolan indikator: Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan			12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan		325 Kegiatan	12 Laporan	12 Laporan	

Nama Perangkat Daerah : Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan												
Kode	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi		Capaian		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024(n)	Tahun 2025(n+1)	Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
	PERENCANAAN											
1.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											
	Administrasi Kepagawijan Perangkat Daerah			100	point	100	point	100	point	100	point	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100	point	100	point	100	point	100	point	
	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan			100	point	100	point	100	point	100	point	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	point	100	point	100	point	100	point	
	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan			100	point	100	point	100	point	100	point	
	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI											
	FASILITASI PENATAAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN											
	1. Persentase Perangkat Daerah Dengan Dokumen Jabatan Lengkap (UT, Anjab, ABK, Evjab)			%	%	%	%	%	%	%	%	
	2. Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan Fasilitas Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah			Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	
	3. Persentase Perangkat Daerah Dengan Dokumen Jabatan Lengkap (UT, Anjab, ABK, Evjab)			%	%	%	%	%	%	%	%	
	Fasilitas Penataan Kelembagaan Provinsi											
	1. Persentase perangkat daerah Prov Kalsel dengan kelembagaan yang ideal			%	%	%	%	%	%	%	%	
	2. Jumlah PD Provinsi yang dilakukan evaluasi penataan kelembagaan			PD	PD	PD	PD	PD	PD	PD	PD	
	Fasilitas Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota											
	1. Persentase perangkat daerah Prov Kalsel dengan kelembagaan yang ideal			%	%	%	%	%	%	%	%	
	2. Jumlah Kab/Kota yang dilakukan fasilitas/evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah nya			PD	PD	PD	PD	PD	PD	PD	PD	
	Penataan Analisis Jabatan											
	1. Persentase perangkat daerah Prov Kalsel dengan kelembagaan yang ideal			%	%	%	%	%	%	%	%	
	2. Jumlah Perangkat Daerah Provinsi Kalsel yang memiliki Informasi Jabatan yang lengkap dan sesuai kelentutan			PD	PD	PD	PD	PD	PD	PD	PD	
	FASILITASI REFORMASI BIROKRASI DAN AKUNTABILITAS KINERJA											
	1. Persentase perangkat daerah yang menerapkan reformasi birokrasi dengan baik			%	%	%	%	%	%	%	%	
	2. Persentase perangkat daerah yang menyampaikan Analisa efisiensi penggunaan sumber daya secara mendetail			%	%	%	%	%	%	%	%	
	3. Persentase perangkat daerah yang terlibat menyampaikan laporan kinerja bulanan dan tahunan			%	%	%	%	%	%	%	%	
	4. Persentase perangkat daerah yang terlibat menyampaikan laporan kinerja bulanan dan tahunan			%	%	%	%	%	%	%	%	
	5. Persentase perangkat daerah yang terlibat menyampaikan laporan kinerja bulanan dan tahunan			%	%	%	%	%	%	%	%	
	6. Persentase perangkat daerah dengan pohon kinerja crosscutting nya inter dan antar perangkat daerah yang sesuai			%	%	%	%	%	%	%	%	
	7. Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Budaya Kerja dengan Baik			%	%	%	%	%	%	%	%	
	8. Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Peta Proses Bisnis			%	%	%	%	%	%	%	%	
	9. Persentase Perangkat Daerah Patuh SOP			%	%	%	%	%	%	%	%	
	10. Nilai Rata-Rata SKM Perangkat Daerah Prov. Kalsel			Point	Point	Point	Point	Point	Point	Point	Point	
	11. Persentase Perangkat Daerah dengan kriteria pelayanan publik "Baik"			%	%	%	%	%	%	%	%	
	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi											
	1. Persentase perangkat daerah Prov Kalsel dengan kelembagaan yang ideal			%	%	%	%	%	%	%	%	
	2. Persentase perangkat daerah yang mampu menerapkan reformasi birokrasi dengan baik			%	%	%	%	%	%	%	%	
	3. Persentase Perangkat Daerah dengan nilai verifikasi PMPRB min. 30			%	%	%	%	%	%	%	%	
	4. Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			Dok	Dok	Dok	Dok	Dok	Dok	Dok	Dok	
	4. Persentase Perangkat Daerah yang membuat dan melaksanakan Rencana Aksi RB secara general			%	%	%	%	%	%	%	%	
	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja											
	1. Persentase perangkat daerah Prov Kalsel dengan kelembagaan yang ideal			%	%	%	%	%	%	%	%	
	2. Persentase perangkat daerah yang mampu menerapkan reformasi birokrasi dengan baik			%	%	%	%	%	%	%	%	
	3. Nilai Laporan Kinerja Pemda			%	%	%	%	%	%	%	%	
	4. Persentase Perangkat Daerah dengan Kualifikasi nilai SAKIP minimal AA			%	%	%	%	%	%	%	%	
	1. Jumlah dok hasil monev akuntabilitas kinerja			Dok	Dok	Dok	Dok	Dok	Dok	Dok	Dok	
	2. Jumlah dok monev terkait review pimpinan PD pada laporan kinerja tahunan			Dok	Dok	Dok	Dok	Dok	Dok	Dok	Dok	
	3. Jumlah dok monev penyampaian laporan kinerja bulanan dan tahunan			Dok	Dok	Dok	Dok	Dok	Dok	Dok	Dok	
	4. Jumlah dokumen monev terkait alur csf dalam pohon kinerja PD			Dok	Dok	Dok	Dok	Dok	Dok	Dok	Dok	
	5. Jumlah dokumen monev crosscutting, inter dan antar PD pada pohon kinerja PD			Dok	Dok	Dok	Dok	Dok	Dok	Dok	Dok	
	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja											
	1. Persentase perangkat daerah Prov Kalsel dengan kelembagaan yang ideal			%	%	%	%	%	%	%	%	
	2. Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan RB dengan baik			%	%	%	%	%	%	%	%	
	3. Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki Kelompok Budaya Kerja Aktif			PD	PD	PD	PD	PD	PD	PD	PD	
	4. Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan hasil Evaluasi Budaya Kerja Kategori Baik			PD	PD	PD	PD	PD	PD	PD	PD	
	5. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja			Dok	Dok	Dok	Dok	Dok	Dok	Dok	Dok	
	Pengelolaan Tatakelana Pemerintahan											
	1. Persentase perangkat daerah Prov Kalsel dengan kelembagaan yang ideal			%	%	%	%	%	%	%	%	
	2. Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan RB dengan baik			%	%	%	%	%	%	%	%	
	3. Persentase Perangkat Daerah yang memiliki peta Proses Bisnis			%	%	%	%	%	%	%	%	
	4. Persentase Perangkat Daerah yang menyusun SOP berdasarkan Pergub			%	%	%	%	%	%	%	%	
	5. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan			Dok	Dok	Dok	Dok	Dok	Dok	Dok	Dok	
	Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik											
	1. Persentase perangkat daerah Prov Kalsel dengan kelembagaan yang ideal			%	%	%	%	%	%	%	%	
	2. Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan RB dengan baik			%	%	%	%	%	%	%	%	
	3. Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan publik dengan baik dan sesuai standar pelayanan			%	%	%	%	%	%	%	%	
	4. Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik			dok	dok	dok	dok	dok	dok	dok	dok	

Tabel T- C.30												
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah												
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan												
Unit Organisasi :												
Sub Unit Organisasi : Pemerintahan dan Otonomi Daerah												
No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (n - 2)	Tahun 2024 (n - 1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n + 1)	Tahun 2023 (n - 2)	Tahun 2024 (n - 1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n + 1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Indikator Kinerja Kunci											
1												
2												
3												
4	dst.....											
2.	Indikator Kinerja PD											
10 1	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Kesekretariatan	100 Poin		20	20	20	20	50	80	80	100	
2	Persentase Potensi Kerja Sama yang direalisasikan	75%		15%	15%	15%	15%	30%	60.00%	65%	75%	
3	Status LPPD Provinsi Kalimantan Selatan	Tinggi		Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	
4	Persentase Bidang Pemerintahan yang ditindaklanjuti stakeholders.	100%		20	20	20	20	50	80	80	100	
5	Nilai SKM/IKM	80		15%	15%	15%	15%	30%	60.00%	65%	80%	
6	Inovasi Biro Pemerintahan yang ditindaklanjuti	100%		20	20	20	20	50	80	80	100	
7	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan, dan Kerja Sama Daerah dengan tingkat capaian hasil Outcome (100%)	1		1	1	1	1	1	1	1	1	

Tabel T- C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Unit Organisasi : Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : Biro Pengadaan Barang dan Jasa

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)	
1.	Indikator Kinerja Kunci											
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	33%	10%	-	15%	15%	15%	-	37,28%	15%	15%	
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	33%		10%	10%	10%	10%	15%	12,53%	10%	10%	
4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi pada pelaksanaan PBJ Pemerintah Daerah	33%		30%	30%	30%	30%	57,84%	20,54%	30%	30%	
2.	Indikator Kinerja PD											
	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan											
	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang baik			100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			12 dok	2 dok	6 dok	6 dok	-	6 dok	5 dok	8 dok	
	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang baik			100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
	Jumlah laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran			1 Laporan	12 dok	6 dok	4 dok	-	12 dok	12 dok	8 dok	
	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang baik			100%	100%	100%	100%	-	100%			
	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			116 stell	120 stell	240 stell	246 paket	-	140 lembar	2 paket	240 stell	
	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang baik			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi			-	-	-	2 laporan	-	-	-	2 laporan	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			1 dok	12 dok	12 dok	12 dok	1 dok	12 dok	12 dok	12 dok	
	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang baik			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			10 unit/buah	33 unit	64 unit/paket	13 unit/paket	10 unit	33 unit	64 unit/paket	13 unit/paket	
	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang baik			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan			12 laporan/bulan	12 laporan/bulan	12 laporan/bulan	12 laporan/bulan	12 laporan/bulan	12 laporan/bulan	12 laporan/bulan	12 laporan/bulan	
	Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa;			Level 3+	-	-	-	Level 3+	-	-	-	
	Predikat Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa			-	75 (Baik)	85 (Baik)	88 (Baik)	79	90,21	85 baik	88 baik	
	Rasio Nilai Belanja yang dilakukan Melalui Pengadaan	33%	10%	25%	25%	25%	25%	54,38%	59,91	25%	25%	
	Nilai Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;			85	87	87	87	99,7	99,83	87	87	

Persentase proses PBJ Prov.Kalsel yang sesuai ketentuan perundang-undangan dan tepat waktu			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Persentase pengadaan barang dan jasa dengan hasil evaluasi bebas mark up			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Jumlah laporan hasil strategi pengadaan barang dan jasa			2 laporan	2 laporan	12 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	12 laporan	2 laporan	
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa			12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	
Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa			12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	
Persentase pemenuhan layanan LPSE sesuai ketentuan dan tepat waktu			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Rasio gangguan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang dapat diselesaikan			0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	
Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik			12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	
Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa			12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	
Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa			12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	
Persentase ketersediaan SDM Pengadaan Barang dan Jasa yang berkualitas dan bersertifikat PBJ.			50%	57,14%	66,67%	75%	86,67%	97,56%	66,67%	75%	
Persentase pelayanan administrasi Tata usaha Biro			-	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
Persentase Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) provinsi, kabupaten/kota dengan tingkat kematangan minimal Level 3			17%	18,18%	30%	44,44%	21,43%	45,45%	30%	44,44%	
Persentase terpenuhinya layanan permasalahan pengadaan barang dan jasa			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Jumlah orang yang mengikuti pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa			5 org	25 org	40 org	45 org	5 org	39 org	40 org	45 org	
Jumlah laporan hasil penataan kelembagaan pengadaan barang dan jasa			12 laporan	12 dok	12 dok	12 dok	12 dok	12 dok	12 dok	12 dok	
Jumlah laporan hasil pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa			12 laporan	12 dok	12 dok	12 dok	12 dok	12 dok	12 dok	12 dok	

Tujuan Pembangunan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat daerah Kalimantan Selatan, sehingga mewujudkan visi masyarakat **“KALSEL BEKERJA”**. Untuk meningkatkan kualitas pembangunan yang diarahkan untuk mendukung terwujudnya masyarakat Kalimantan Selatan yang berkembang, maju, unggul, nyaman, sejahtera dan damai tersebut, sangat dipengaruhi pula oleh perubahan-perubahan lingkungan strategis internal maupun eksternal dalam skala regional, nasional dan internasional.

Perubahan-perubahan lingkungan strategis internal maupun eksternal dalam skala regional, nasional dan internasional tersebut saling terkait memberikan pengaruh terhadap Rencana Strategis (RENSTRA) dan orientasi pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026.

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Permasalahan umum yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

No.	Permasalahan Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Penerapan kebijakan pada Sekretariat Daerah	Belum optimalnya dukungan dalam penerapan kebijakan	Peraturan dan sistem prosedur kerja yang selalu berubah-ubah.
2.	Pelaksanaan koordinasi pada Sekretariat Daerah	Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi	1. Masih adanya tumpang tindih tugas dan fungsi dengan SKPD lain 2. Masih rendahnya pemahaman OPD terhadap tugas dan fungsi Setda
3.	<i>Standard Operating Procedure</i> pada Sekretariat Daerah	Belum lengkapnya prosedur operasi baku (<i>Standard Operating</i>	Masih banyaknya pelaksanaan tugas yang tidak berpedoman pada

		<i>Procedure)</i>	SOP
4.	Kualitas SDM Aparatur Sekretariat Daerah	1. Belum optimal Kualitas SDM aparatur sekretariat daerah 2. Belum optimalnya pemahaman atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	1. Masih rendahnya kualitas SDM aparatur Sekretariat Daerah 2. Masih rendahnya pemahaman atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
5.	Sarana dan prasarana Pada sekretariat Daerah	Belum optimalnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	1.1 Kurangnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 2.1 Masih belum tersedianya anggaran yang memadai

B. **Penentuan Isu-Isu Strategis**

a. **Kondisi Saat Ini**

Secara umum kondisi saat ini dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dalam pengkoordinasian kebijakan Pembangunan Daerah :

1. Bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama.
2. Bidang perancangan dan penyusunan produk hukum daerah, bantuan hukum dan informasi hukum
3. Bidang Penerapan Reformasi Birokrasi dan pelayanan publik di Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Bidang pengendalian dan pelaporan administrasi pelaksanaan pembangunan daerah.

5. Bidang Bina Mental Spiritual, kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar.
6. Bidang Materi dan Administrasi Pimpinan, Komunikasi Pimpinan dan Keprotokolan.
7. Bidang Pelayanan terhadap Stakeholder Eksternal dan Internal Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Bidang Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Pembinaan dan Advokasi serta Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa. (Biro Pengadaan Barang dan Jasa)
9. Bidang Kebijakan perekonomian, sumber daya alam, BUMD dan BLUD.

b. Kondisi Yang Diharapkan

Kondisi yang diinginkan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan dalam :

1. Bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama.
2. Bidang perancangan dan penyusunan produk hukum daerah, bantuan hukum dan informasi hukum.
3. Bidang Penerapan Reformasi Birokrasi dan pelayanan publik di Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Bidang pengendalian dan pelaporan administrasi pelaksanaan pembangunan daerah.
5. Bidang Bina Mental Spiritual, kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar.
6. Bidang Materi dan Administrasi Pimpinan, Komunikasi Pimpinan dan Keprotokolan.
7. Bidang Pelayanan terhadap Stakeholder Eksternal dan Internal Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Bidang Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Pembinaan dan Advokasi serta Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa. (Biro Pengadaan Barang dan Jasa)

9. Bidang Kebijakan perekonomian, sumber daya alam, BUMD dan BLUD

c. Analisis Lingkungan Strategis

Analisis lingkungan strategis terlebih dahulu diawali dengan menentukan prioritas terhadap faktor-faktor lingkungan strategis yang secara spesifik dapat menentukan kondisi yang akan dicapai Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 dengan menghindari adanya grey areas.

d. Analisis Lingkungan Internal.

1. Kekuatan (Strengths).

- a. Adanya kewenangan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- b. Adanya dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam pelaksanaan tugas-tugas bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- c. Tersedianya tenaga analis dan fungsional, staf teknis dan administrasi yang kapabel.

2. Kelemahan (Weaknesses).

- a. Kurangnya pemahaman atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- b. Belum optimalnya pembinaan tenaga analis, fungsional, staf teknis dan administrasi untuk dipromosikan dalam jabatan struktural.
3. Belum memadainya sarana dan prasarana kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas (kendaraan operasional, ruang kerja, komputer dll.).

e. Analisis Lingkungan Eksternal.

1. Peluang (Opportunities).

- a. Kebijakan dan komitmen Kepala Daerah terhadap penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Perangkat Daerah yang efektif, efisien dan profesional berbasis kinerja.
- b. Tuntutan peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah daerah.

- c. Tuntutan publik untuk mengembangkan penerapan akuntabilitas kinerja di semua Perangkat Daerah Provinsi untuk mendukung terwujudnya *good governance* dan *clean government*.

2. Tantangan/Ancaman (Threats).

1. Adanya tuntutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
2. Belum adanya pola hubungan kerja antar Perangkat Daerah dan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Adanya tuntutan meningkatkan koordinasi pelaksanaan program pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pendayagunaan aparatur dengan seluruh Perangkat Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota.

f. Asumsi Strategis

Asumsi strategis perencanaan pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan menggunakan Analisis Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (SWOT Analysis), sehingga diperoleh asumsi strategis sebagai berikut :

A. Asumsi Strategis Strengths – Opportunities (SO).

1. Optimalkan kewenangan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan untuk mendukung implementasi kebijakan dan komitmen Gubernur terhadap penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Perangkat Daerah yang efektif, efisien dan profesional berbasis kinerja.
2. Optimalkan dukungan APBD dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah daerah.
3. Optimalkan tenaga analis jabatan dan hasil analisa beban kerja secara sinergis untuk mengembangkan penerapan akuntabilitas kinerja di semua Perangkat Daerah Provinsi sebagai upaya mendukung terwujudnya *good governance* dan *clean government*.

B. Asumsi Strategis Strengths – Threats (ST).

1. Manfaatkan kewenangan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
2. Manfaatkan dukungan APBD dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan untuk menyusun pola hubungan kerja antar Perangkat Daerah dan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Manfaatkan tenaga analis jabatan dan hasil analisa beban kerja untuk melakukan evaluasi dan kajian akademis peningkatan koordinasi pelaksanaan program pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pendayagunaan aparatur dengan Perangkat Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

C. Asumsi Strategis Weaknesses – Opportunities (WO).

1. Tingkatkan pemahaman atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan memanfaatkan kebijakan serta komitmen Kepala Daerah terhadap penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Perangkat Daerah yang efektif, efisien dan profesional berbasis kinerja.
2. Tingkatkan pembinaan staf teknis dan administrasi untuk dipromosikan dalam jabatan struktural dengan memanfaatkan upaya peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah daerah.
3. Tingkatkan sarana dan prasarana kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas dengan memanfaatkan pengembangan penerapan akuntabilitas kinerja bagi seluruh Perangkat Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota..

D. Asumsi Strategis Weaknesses – Threats (WT).

1. Tingkatkan pemahaman atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk mengantisipasi memanfaatkan adanya tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Tingkatkan pembinaan staf teknis dan administrasi untuk dipromosikan dalam jabatan struktural untuk mengurangi dampak

karena belum adanya pola hubungan kerja antar Perangkat Daerah dan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten / Kota.

3. Tingkatkan kualitas dan kuantitas sarana serta prasarana kerja guna mengantisipasi adanya tuntutan peningkatan koordinasi pelaksanaan program pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pendayagunaan aparatur dengan seluruh Perangkat Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

E. Prioritas Asumsi Strategis.

Prioritas asumsi strategis ditetapkan dengan menentukan hasil asumsi strategis yang paling dominan dapat mewujudkan visi, misi, tujuan, dan strategi pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan tetap mempertimbangkan kebijakan-kebijakan baru internal maupun eksternal yang signifikan sangat berpengaruh terhadap pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 5 (lima) tahun ke depan.

Berdasarkan analisis asumsi strategis yang dikombinasikan dengan analisis kebijakan, maka prioritas dari asumsi strategis yang dipilih untuk mencapai tujuan pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut :

1. Optimalkan kewenangan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan untuk mendukung implementasi kebijakan dan komitmen Gubernur terhadap penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Perangkat Daerah yang efektif, efisien dan profesional berbasis kinerja.
2. Optimalkan tenaga analis jabatan, dan hasil analisa beban kerja secara sinergis untuk mengembangkan penerapan akuntabilitas kinerja di semua Perangkat Daerah Provinsi sebagai upaya mendukung terwujudnya good governance dan clean goverment.
3. Manfaatkan kewenangan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

4. Manfaatkan dukungan APBD dalam pelaksanaan tugas-tugas bidang administrasi pemerintahan, pembangunan dan Tingkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja guna mengantisipasi adanya tuntutan peningkatan koordinasi pelaksanaan program pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pendayagunaan aparatur dengan seluruh Perangkat Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

F. Faktor Kunci Keberhasilan.

Faktor kunci keberhasilan atau critical succes factors merupakan capaian kongkret dari prioritas asumsi strategis yang dapat menunjukkan tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan (kinerja) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Pada tataran implementasi operasional, aspek-aspek faktor kunci keberhasilan tersebut substansinya dirinci lebih lanjut di dalam tujuan, sasaran, dan strategi sesuai dengan perubahan-perubahan kebijakan internal maupun eksternal.

Faktor kunci keberhasilan yang diharapkan dapat menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan (kinerja) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Penataan Lembaga Perangkat Daerah yang efektif, efisien dan profesional berbasis kinerja.
2. Penerapan akuntabilitas kinerja di semua Perangkat Daerah Provinsi melibatkan tenaga analis, staf teknis dan administrasi.
3. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Pemanfaatan dukungan APBD dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan untuk menyusun pola hubungan kerja antar Perangkat Daerah dan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
5. Peningkatan koordinasi pelaksanaan program pendayagunaan aparatur di seluruh Perangkat Daerah Provinsi dengan didukung oleh

peningkatan sarana dan prasarana kerja (kendaraan operasional, ruang kerja, komputer dll).

2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD (2.4)

Tujuan yang ingin dicapai oleh Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah meningkatkan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, meningkatkan kebijakan perekonomian dan pembangunan yang berkualitas, dan meningkatkan kebijakan pelayanan publik yang berkualitas. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu didukung dengan program dan kegiatan.

Review terhadap rancangan awal RKPD adalah membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk meninjau ulang apakah program dan kegiatan yang sudah disusun dalam rancangan awal RKPD sesuai dengan kebutuhan riil Perangkat Daerah berdasarkan kondisi di lapangan. Hasil review tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel T- C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Unit Organisasi : Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Sub Unit Organisasi :

No				Rancangan Awal RKPD			Target Capaian			Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
				Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	SATUAN	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)				(2)	(3)	(4)		(5)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	BANJARBARU	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Sekretariat	100	Point	211,137,525,532	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	BANJARBARU	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Sekretariat	100	Point	211,137,525,532
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BANJARBARU	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang baik	100	%	492,006,150	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BANJARBARU	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang baik	100	%	492,006,150
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BANJARBARU	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15	Laporan	492,006,150	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BANJARBARU	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15	Laporan	492,006,150
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BANJARBARU	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang baik	100	%	95,225,208,748	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BANJARBARU	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang baik	100	%	95,225,208,748
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BANJARBARU	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	316	Orang	92,072,486,448	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BANJARBARU	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	316	Orang	92,072,486,448
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BANJARBARU	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	2,232,421,800	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BANJARBARU	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	2,232,421,800
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BANJARBARU	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12	Laporan	461,454,700	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BANJARBARU	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12	Laporan	461,454,700
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	BANJARBARU	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12	Dokumen	458,845,800	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	BANJARBARU	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12	Dokumen	458,845,800
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BANJARBARU	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	100	%	1,147,500,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BANJARBARU	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	100	%	1,147,500,000
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BANJARBARU	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	12	Paket	1,147,500,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BANJARBARU	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	12	Paket	1,147,500,000
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	BANJARBARU	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang baik	100	%	32,251,078,600	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BANJARBARU	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang baik	100	%	32,251,078,600
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BANJARBARU	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket	621,714,800	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BANJARBARU	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket	621,714,800
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BANJARBARU	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	626,749,500	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BANJARBARU	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	626,749,500
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BANJARBARU	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	2,321,996,800	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BANJARBARU	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	2,321,996,800
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	BANJARBARU	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	1,476,424,800	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	BANJARBARU	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	1,476,424,800
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BANJARBARU	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12	Dokumen	897,750,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BANJARBARU	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12	Dokumen	897,750,000
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BANJARBARU	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	26,306,442,700	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BANJARBARU	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	26,306,442,700
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BANJARBARU	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang baik	100	%	45,384,250,703	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BANJARBARU	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang baik	100	%	45,384,250,703
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BANJARBARU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	47,807,550	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BANJARBARU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	47,807,550
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BANJARBARU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	14,386,069,778	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BANJARBARU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	14,386,069,778
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BANJARBARU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	3,510,000,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BANJARBARU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	3,510,000,000
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BANJARBARU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	27,440,373,375	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BANJARBARU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	27,440,373,375
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BANJARBARU	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang baik	100	%	27,059,572,800	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BANJARBARU	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang baik	100	%	27,059,572,800
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BANJARBARU	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	Unit	12,735,589,500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BANJARBARU	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	Unit	12,735,589,500
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BANJARBARU	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	Unit	10,064,206,800	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BANJARBARU	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	Unit	10,064,206,800
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BANJARBARU	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	Unit	4,259,776,500	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BANJARBARU	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	Unit	4,259,776,500
				Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	BANJARBARU	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang baik	100	%	9,577,908,531	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	BANJARBARU	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang baik	100	%	9,577,908,531
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	BANJARBARU	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	Orang	9,577,908,531	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	BANJARBARU	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	Orang	9,577,908,531

Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Unit Organisasi : Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : Biro Perekonomian

				Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
				Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp. 000)
				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)
1	6			Program Perekonomian dan Pembangunan	Banjarbaru	1. Prosentase BUMD yang Sehat 2. Prosentase BLUD yang Baik 3. Tingkat Inflasi yang Stabil	1. 100 % 2. 100 % 3. 2,5 ± 1 %	3,046,566,600						
1	6	1.01		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Banjarbaru	Prosentase Analisis Ekonomi yang ditindaklanjuti	100%	1,041,647,200						
1	6	1.01	1	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Banjarbaru	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	12Dokumen	550,000,000						
1	6	1.01	2	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Banjarbaru	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	12Dokumen	491,647,200						
1	6	1.02		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Banjarbaru	Prosentase Analisis Sumber Daya Alam yang ditindaklanjuti	100%	909,919,600						
1	6	1.02	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Banjarbaru	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	12Dokumen	279,919,600						
1	6	1.02	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Banjarbaru	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	12Dokumen	330,000,000						
1	6	1.02	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Banjarbaru	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	12Dokumen	300,000,000						
1	6	1.03		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Banjarbaru	Prosentase Analisis BUMD dan BLUD yang ditindaklanjuti	100%	1,094,999,800						
1	6	1.03	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Banjarbaru	Jumlah Dokumen HasilKoordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	12Dokumen	380,000,000						
1	6	1.03	2	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Banjarbaru	Jumlah Dokumen HasilKoordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	12Dokumen	305,000,000						
1	6	1.03	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Banjarbaru									
1	6	1.03	4	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Banjarbaru	Jumlah Dokumen HasilKoordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	12Dokumen	409,999,800						
1	6	1.03	5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Banjarbaru									
XX	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Banjarbaru	1. Nilai IKM 2. Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang Dicanangkan	1. 3,5 Poin 2. 1 Buah	1,463,098,550						
XX	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Banjarbaru	Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	164,520,000						
XX	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Banjarbaru	Jumlah Dokumen Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12Dokumen	164,520,000						
XX	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Banjarbaru	Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1,041,858,550						
XX	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Banjarbaru	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12Paket	22,096,550						
XX	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Banjarbaru	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12Paket	17,600,000						
XX	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Banjarbaru	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12Laporan	1,002,162,000						
XX	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Banjarbaru	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	76,300,000						
XX	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Banjarbaru	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9 Unit	76,300,000						
XX	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Banjarbaru	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	154,210,000						
XX	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Banjarbaru	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12Laporan	154,210,000						
XX	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Banjarbaru	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	26,210,000						
XX	1	1.09	10	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Banjarbaru	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	26,210,000						
TOTAL PAGU ANGGARAN								4,509,665,150		TOTAL PAGU ANGGARAN				

Tabel T- C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Unit Organisasi :
Sub Unit Organisasi : Biro Kesejahteraan Rakyat

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kalsel	Indeks Kepuasan Terhadap layanan Kesekretariatan	100 Point	1,700,000,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kalsel	Indeks Kepuasan Terhadap layanan Kesekretariatan	100 Point	1,700,000,000	
4	1	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kalsel	Persentase Target Capaian Kinerja Biro	100%	550,000,000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kalsel	Persentase Target Capaian Kinerja Biro	100%	550,000,000	
4	1	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kalsel	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	300,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kalsel	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	300,000,000	
4	1	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kalsel	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	12 Laporan	250,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Kalsel	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	12 Laporan	250,000,000	
4	1	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kalsel	Persentase Target Capaian Kinerja Biro	100%	900,000,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kalsel	Persentase Target Capaian Kinerja Biro	100%	900,000,000	
4	1	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kalsel	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	900,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kalsel	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	900,000,000	
4	1	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kalsel	Persentase Target Capaian Kinerja Biro	100%	250,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kalsel	Persentase Target Capaian Kinerja Biro	100%	250,000,000	
4	1	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kalsel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	250,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kalsel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	250,000,000	
4	1	4			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kalsel	Tingkat Kondusifitas Kerukunan Umat Beragama Persentase Peningkatan Pengumpulan Zakat, Infad, dan Sadakah (ZIS) dari Badan Amil Zakat (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan NILAI IKM Jumlah Inovasi yang dicanangkan	74.3 35% 90 1	98,300,000,000	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kalsel	Tingkat Kondusifitas Kerukunan Umat Beragama Persentase Peningkatan Pengumpulan Zakat, Infad, dan Sadakah (ZIS) dari Badan Amil Zakat (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan NILAI IKM Jumlah Inovasi yang dicanangkan	74.3 35% 90 1	98,300,000,000	
4	1	4	1		Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Kalsel	Persentase Kegiatan Bina Mental Spiritual Yang Difasilitasi	100%	70,000,000,000	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Kalsel	Persentase Kegiatan Bina Mental Spiritual Yang Difasilitasi	100%	70,000,000,000	
4	1	4	1	1	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Kalsel	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	320 Unit	40,000,000,000	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Kalsel	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	320 Unit	40,000,000,000	
4	1	4	1	2	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Kalsel	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	200 Lembaga	30,000,000,000	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Kalsel	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	200 Lembaga	30,000,000,000	
4	1	4	1	2	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Kalsel	Persentase Kab/kota yang Melaksanakan urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Sesuai IKK	100%	26,200,000,000	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Kalsel	Persentase Kab/kota yang Melaksanakan urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Sesuai IKK	100%	26,200,000,000	
4	1	4	1	2.01	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Kalsel	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	13 Dokumen	25,000,000,000	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Kalsel	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	13 Dokumen	25,000,000,000	
4	1	4	1	2.02	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Kalsel	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	13 Dokumen	900,000,000	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Kalsel	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	13 Dokumen	900,000,000	
4	1	4	1	2.03	Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Kalsel	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	13 Dokumen	300,000,000	Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Kalsel	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	13 Dokumen	300,000,000	
4	1	4	1	3	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Kalsel	Persentase Kab/kota yang Melaksanakan urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Sesuai IKK	100%	2,100,000,000	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Kalsel	Persentase Kab/kota yang Melaksanakan urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Sesuai IKK	100%	2,100,000,000	
4	1	4	1	3.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Kalsel	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	13 Dokumen	1,500,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Kalsel	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	13 Dokumen	1,500,000,000	
4	1	4	1	3.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi	Kalsel	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi	13 Dokumen	300,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi	Kalsel	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi	13 Dokumen	300,000,000	
4	1	4	1	3.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Kalsel	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	13 Dokumen	300,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Kalsel	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	13 Dokumen	300,000,000	
TOTAL PAGU ANGGARAN									100,000,000,000	TOTAL PAGU ANGGARAN				100,000,000,000	

Unit Organisasi : SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : BIRO HUKUM

56

Tabel T- C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Unit Organisasi : Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Sub Unit Organisasi : Biro Administrasi Pembangunan

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting				
Kode	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)						
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)					
4	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	13 Kab/Kota, Luar Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Kesekretariatan	100 Point	7,689,325,300	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Kota Banjarbaru	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Kesekretariatan	100 Point	7,689,325,300				
4	01	01	1	01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Kab/Kota, Luar Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang baik	100%	6,900,000,000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang baik	100%	6,900,000,000				
4	01	01	1	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Kab/Kota, Luar Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Lap	6,900,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Kab/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Lap	6,900,000,000	
4	01	01	1	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Banjarbaru, Luar Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang baik	100%	434,325,300	Administrasi Umum Perangkat Daerah yang baik	100%	434,325,300				
4	01	01	1	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Banjarbaru	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	84,325,300	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Banjarbaru	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	84,325,300	
4	01	01	1	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Banjarbaru, Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap	350,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Banjarbaru	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	350,000,000	
4	01	01	1	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Banjarbaru	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang baik	100%	325,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang baik	100%	325,000,000				
4	01	01	1	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Banjarbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	325,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Banjarbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	325,000,000	
4	01	01	1	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Banjarbaru	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang baik	100%	30,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang baik	100%	30,000,000				
4	01	01	1	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mebel Lainnya	Kota Banjarbaru	Jumlah Peralatan dan Mebel Lainnya yang Dipeiltras	30 Unit	30,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mebel Lainnya yang Dipeiltras	Kota Banjarbaru	Jumlah Peralatan dan Mebel Lainnya yang Dipeiltras	30 Unit	30,000,000	
4	01	08			Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	13 Kab/Kota, Luar Daerah	Persentase Pemaksimalan yang dapat Disediakan	100%	1,533,257,000	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	13 Kab/Kota	Persentase Pemaksimalan yang dapat Disediakan	100%	1,533,257,000		
4	01	08	1	01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	13 Kab/Kota, Luar Daerah	Persentase Rekomendasi masalah pelaksanaan pembangunan wilayah yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	100%	1,033,257,000	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	13 Kab/Kota	Persentase Rekomendasi masalah pelaksanaan pembangunan daerah sumber dana APBD dan APBN yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	100%	1,033,257,000		
								Jumlah Laporan hasil Pengendalian Administrasi pelaksanaan pembangunan Wilayah	1 Lap							
4	01	08	1	01	01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	13 Kab/Kota, Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	1 Lap	303,257,000	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	13 Kab/Kota, Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	1 Lap	303,257,000	- Keterbatasan Sumber Daya Aparatur di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBD guna mendukung pemenuhan kegiatan. - Kurang ditumbuhkannya Biro administrasi pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam proses perencanaan, pengujian, refoosing serta perubahan dana APBD
4	01	08	1	01	02	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	13 Kab/Kota, Luar Daerah	Jumlah SKPD yang di Analisa Permasalahan Pembangunan Sumber Dana APBN	49 SKPD	303,257,000	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	13 Kab/Kota, Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	1 Lap	260,000,000	- Belum adanya sistem aplikasi teknologi informasi pendukung guna pengumpulan data dan penyusunan pelaporan yang mendukung pemenuhan monitoring dan evaluasi dana APBN.
4	01	08	1	01	03	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	13 Kab/Kota, Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	3 Lap	450,000,000	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	13 Kab/Kota, Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	3 Lap	450,000,000	- Kurang keterbacaannya informasi dan data pendukung di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan di wilayah yang diperlukan untuk mengidentifikasi permasalahan/rendala pelaksanaan pembangunan daerah. - Keterbatasan Sumber Daya Aparatur di bidang pengendalian administrasi
4	01	08	1	02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	13 Kab/Kota, Luar Daerah	Persentase Meningkatnya Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100%	500,000,000	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	13 Kab/Kota, Luar Daerah	Persentase Meningkatnya Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100%	500,000,000		- Kurang keterbacaannya informasi dan data pendukung capaian kinerja pembangunan yang diperlukan untuk bahan analisis. - Keterbatasan terkumpulnya data permasalahan pelaksanaan pembangunan yang akurat, belum begitu optimalnya keterbacaan wawasan dalam hal pengendalian permasalahan pelaksanaan pembangunan yang di hadapi. - Keterbatasan Sumber Daya Aparatur di bidang Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah guna mendukung pemenuhan kegiatan.
4	01	08	1	02	01	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	13 Kab/Kota, Luar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	4 Dok	150,000,000	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	13 Kab/Kota, Luar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	4 Dok	150,000,000	- Kurang keterbacaannya informasi dan data pendukung yang diperlukan untuk mengidentifikasi permasalahan/rendala pelaksanaan pembangunan daerah. - Keterbatasan Sumber Daya Aparatur di bidang Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah guna mendukung pemenuhan kegiatan.
4	01	08	1	02	02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	13 Kab/Kota, Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 Lap	150,000,000	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	13 Kab/Kota, Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 Lap	150,000,000	- Kurang keterbacaannya informasi dan data pendukung yang diperlukan untuk mengidentifikasi permasalahan/rendala pelaksanaan pembangunan daerah. - Keterbatasan Sumber Daya Aparatur guna mendukung pemenuhan kegiatan.
4	01	08	1	02	03	Facilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	13 Kab/Kota, Luar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah	1 Dok		Facilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	13 Kab/Kota, Luar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah	1 Dok	200,000,000	- Kurang keterbacaannya informasi dan data pendukung yang diperlukan untuk mengidentifikasi permasalahan/rendala pelaksanaan pembangunan daerah. - Belum terapan sinergitas yang baik antara Biro Administrasi Pembangunan dengan SKPD yang ada di Provinsi maupun Kabupaten/Kota. - Keterbatasan Sumber Daya Aparatur di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah guna mendukung pemenuhan kegiatan.
TOTAL PAGU ANGGARAN										9,222,582,300	TOTAL PAGU ANGGARAN				9,222,582,300	

Unit Organisasi : Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

[illegible]

Tabel T- C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Unit Organisasi : Sekretariat Daerah Prov. Kalsel
Sub Unit Organisasi : Biro Administrasi Pimpinan

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	1	1			PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Banjarbaru	Persentase terpenuhinya penunang urusan pemerintah daerah		21,247,490,000	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Banjarbaru	Persentase terpenuhinya penunang urusan pemerintah daerah		21,247,490,000	
4	1	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Banjarbaru	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Baik	100%	138,600,000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Banjarbaru	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja yang berkualitas	100%	138,600,000	
4	1	1	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Banjarbaru	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	100%	138,600,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Banjarbaru	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan	100%	138,600,000	
4	1	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Banjarbaru	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Baik	100%	150,600,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Banjarbaru	Meningkatnya kualitas administrasi keuangan perangkat daerah	100%	150,600,000	
4	1	1	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Banjarbaru	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	150,600,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Banjarbaru	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	150,600,000	
4	1	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Banjarbaru	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Baik	100%	1,462,400,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Banjarbaru	Meningkatnya kualitas administrasi umum perangkat daerah	100%	1,462,400,000	
4	1	1	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Banjarbaru	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan yang disediakan	100%	412,700,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Banjarbaru	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan yang disediakan	100%	412,700,000	
4	1	1	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13 Kab/Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	1,049,700,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13 Kab/Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	1,049,700,000	
4	1	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Banjarbaru	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Baik	100%	716,760,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Banjarbaru	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Baik	100%	716,760,000	
4	1	1	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Banjarbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	589,600,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Banjarbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	589,600,000	
4	1	1	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Banjarbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	127,160,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Banjarbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	127,160,000	
4	1	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Banjarbaru	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang	100%	9,980,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Banjarbaru	Meningkatnya kualitas aset yang diperbaiki	100%	9,980,000	
4	1	1	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Banjarbaru	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100%	9,980,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin dan Lainnya	Banjarbaru	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100%	9,980,000	
4	1	1	1.13		Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan		Persentase Meningkatnya Kualitas Bahan Materi dan Komunikasi Pimpinan	100%	16,432,050,000	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan		Meningkatnya kualitas bahan materi dan komunikasi pimpinan	100%	16,432,050,000	
4	1	1	1.13	01	Penyediaan Materi Pimpinan	13 Kab/Kota	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	100%	462,700,000	Penyediaan Materi Pimpinan	13 Kab/Kota	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	100%	462,700,000	
4	1	1	1.13	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	13 Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	100%	2,385,950,000	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	13 Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	100%	2,385,950,000	
4	1	1	1.13	03	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	13 Kab/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	100%	13,583,400,000	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	13 Kab/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	100%	13,583,400,000	
4	1	1	1.14		Fasilitasi Keprotokolan		Persentase Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Keprotokolan	100%	2,337,100,000	Fasilitasi Keprotokolan		Meningkatnya kualitas fasilitasi keprotokolan	100%	2,337,100,000	
4	1	1	1.14	01	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	13 Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	100%	824,300,000	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	13 Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	100%	824,300,000	
4	1	1	1.14	02	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	13 Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	697,250,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	13 Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	697,250,000	
4	1	1	1.14	03	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	13 Kab/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	100%	815,550,000	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	13 Kab/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	100%	815,550,000	
TOTAL PAGU ANGGARAN									21,247,490,000	TOTAL PAGU ANGGARAN					

Tabel T. C.31
Review Terhadap Rancangan RKPD Perubahan Tahun 2025
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Unit Organisasi : SEKRETARIAT DAERAH												Unit Organisasi : BIRU HUKUM											
Kode	Rancangan RKPD 2025					Hasil Analisis Berdasarkan Pendekatan RKPD											Catatan Penting						
	Program / Kegiatan	Subprogram	Indikator Kinerja	Tingkat Capaian	Target Indikator (Rp/000)	Program / Kegiatan	Subprogram	Indikator Kinerja	Tingkat Capaian	Target Indikator (Rp/000)	Program / Kegiatan	Subprogram	Indikator Kinerja	Tingkat Capaian	Target Indikator (Rp/000)								
43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43								
4.03.01	PROGRAM PENINGKATAN LEBARAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Berkas/buku	Indikator Kegiatan Terhadap Layanan Masyarakat	80 Poin	2,508,353,000	PROGRAM PENINGKATAN LEBARAN PEMERINTAHAN DAERAH	Berkas/buku	Indikator Kegiatan Terhadap Layanan Masyarakat	80 Poin	2,512,353,000												
4.03.01.3.01	Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Berkas/buku	Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Baik	80 Poin	803,000,000	Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Berkas/buku	Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Baik	100%	1,000,000,000												
4.03.01.3.01.0001	Perencanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Berkas/buku	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	530,000,000	Perencanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berkas/buku	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	630,000,000	Kemendagri No. 4551/2009 Tahun 2023											
4.03.01.3.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Kinerja RKPD		Berkas/buku	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Baik	5 Laporan	370,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Kinerja RKPD	Berkas/buku	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Baik	5 Laporan	380,000,000	Kemendagri No. 4551/2009 Tahun 2023											
4.03.01.3.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Berkas/buku	Perencanaan Administrasi dan Keuangan Perangkat Daerah Yang Baik	80 Poin	213,000,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Berkas/buku	Perencanaan Administrasi dan Keuangan Perangkat Daerah Yang Baik	100%	248,000,000												
4.03.01.3.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Rutin dan Triwulanan dan R/Triswulanan di RKPD		Berkas/buku	Jumlah Laporan Keuangan Rutin dan Triwulanan di RKPD dan R/Triswulanan dan R/Triswulanan di RKPD	5 Laporan	213,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Rutin dan Triwulanan dan R/Triswulanan di RKPD	Berkas/buku	Jumlah Laporan Keuangan Rutin dan Triwulanan di RKPD dan R/Triswulanan dan R/Triswulanan di RKPD	5 Laporan	248,000,000	Kemendagri No. 4551/2009 Tahun 2023											
4.03.01.3.03	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Berkas/buku	Perencanaan Administrasi dan Umum Perangkat Daerah Yang Baik	100%	1,275,000,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Berkas/buku	Perencanaan Administrasi dan Umum Perangkat Daerah Yang Baik	100%	1,368,000,000												
4.03.01.3.03.0002	Penyediaan dan Pelaksanaan dan Perencanaan Kantor		Berkas/buku	Jumlah Paket, Pelaksanaan dan Perencanaan Kantor Yang Baik	3,2 Paket	460,000,000	Penyediaan dan Pelaksanaan dan Perencanaan Kantor	Berkas/buku	Jumlah Paket, Pelaksanaan dan Perencanaan Kantor Yang Baik	3,2 Paket	517,000,000	Kemendagri No. 4551/2009 Tahun 2023											
4.03.01.3.03.0006	Penyediaan dan Pelaksanaan dan Perencanaan Kantor		Berkas/buku	Jumlah Paket, Pelaksanaan dan Perencanaan Kantor Yang Baik	3,2 Paket	75,000,000	Penyediaan dan Pelaksanaan dan Perencanaan Kantor	Berkas/buku	Jumlah Paket, Pelaksanaan dan Perencanaan Kantor Yang Baik	3,2 Paket	80,000,000	Kemendagri No. 4551/2009 Tahun 2023											
4.03.01.3.03.0009	Penyediaan dan Pelaksanaan dan Perencanaan Kantor		Berkas/buku	Jumlah Laporan Perencanaan dan Pelaksanaan Kantor	5,3 Laporan	750,000,000	Penyediaan dan Pelaksanaan dan Perencanaan Kantor	Berkas/buku	Jumlah Laporan Perencanaan dan Pelaksanaan Kantor	5,3 Laporan	800,000,000	Kemendagri No. 4551/2009 Tahun 2023											
4.03.01.3.04	Penyediaan dan Pelaksanaan dan Perencanaan Kantor		Berkas/buku	Perencanaan Administrasi dan Umum Perangkat Daerah Yang Baik	100%	370,000,000	Penyediaan dan Pelaksanaan dan Perencanaan Kantor	Berkas/buku	Perencanaan Administrasi dan Umum Perangkat Daerah Yang Baik	100%	436,000,000												
4.03.01.3.04.0005	Penyediaan dan Pelaksanaan dan Perencanaan Kantor		Berkas/buku	Jumlah Laporan Perencanaan dan Pelaksanaan Kantor	3,2 Laporan	370,000,000	Penyediaan dan Pelaksanaan dan Perencanaan Kantor	Berkas/buku	Jumlah Laporan Perencanaan dan Pelaksanaan Kantor	3,2 Laporan	436,000,000	Kemendagri No. 4551/2009 Tahun 2023											
4.03.05	PROGRAM FASILITAS DAN KECORONGAN HUKUM		Berkas/buku	Perencanaan Fasilitas dan Kecorongan Hukum	100%		PROGRAM FASILITAS DAN KECORONGAN HUKUM	Berkas/buku	Perencanaan Fasilitas dan Kecorongan Hukum	100%													
			Berkas/buku	Perencanaan Fasilitas dan Kecorongan Hukum					Perencanaan Fasilitas dan Kecorongan Hukum														
4.03.05.3.01	Fasilitas Penyusunan Perundang-undangan		Berkas/buku	Perencanaan Fasilitas dan Kecorongan Hukum	100%	6,337,487,000	Fasilitas Penyusunan Perundang-undangan	Berkas/buku	Perencanaan Fasilitas dan Kecorongan Hukum	100%	6,000,370,000												
4.03.05.3.01.0001	Fasilitas Penyusunan Perundang-undangan		Berkas/buku	Jumlah Produk Hukum Pengaturan Yang Baik	60 Dokumen	5,000,000,000	Fasilitas Penyusunan Perundang-undangan	Berkas/buku	Jumlah Produk Hukum Pengaturan Yang Baik	60 Dokumen	5,045,000,000	Kemendagri No. 4551/2009 Tahun 2023											
4.03.05.3.01.0002	Fasilitas Penyusunan Perundang-undangan		Berkas/buku	Jumlah Produk Hukum Pengaturan Yang Baik	100 Dokumen	400,000,000	Fasilitas Penyusunan Perundang-undangan	Berkas/buku	Jumlah Produk Hukum Pengaturan Yang Baik	100 Dokumen	510,000,000	Kemendagri No. 4551/2009 Tahun 2023											
4.03.05.3.01.0003	Fasilitas Penyusunan Perundang-undangan		Berkas/buku	Jumlah Produk Hukum Pengaturan Yang Baik	1000 Dokumen	690,000,000	Fasilitas Penyusunan Perundang-undangan	Berkas/buku	Jumlah Produk Hukum Pengaturan Yang Baik	1000 Dokumen	700,000,000	Kemendagri No. 4551/2009 Tahun 2023											
4.03.05.3.01.0004	Fasilitas Penyusunan Perundang-undangan		Berkas/buku	Jumlah Produk Hukum Pengaturan Yang Baik	1,000 Dokumen	1,000,000,000	Fasilitas Penyusunan Perundang-undangan	Berkas/buku	Jumlah Produk Hukum Pengaturan Yang Baik	1,000 Dokumen	1,000,000,000	Kemendagri No. 4551/2009 Tahun 2023											
4.03.05.3.02	Fasilitas Rencanan Hukum		Berkas/buku	Perencanaan Fasilitas dan Kecorongan Hukum	100%	3,000,000,000	Fasilitas Rencanan Hukum	Berkas/buku	Perencanaan Fasilitas dan Kecorongan Hukum	100%	3,000,000,000												
			Berkas/buku	Perencanaan Fasilitas dan Kecorongan Hukum	100%				Perencanaan Fasilitas dan Kecorongan Hukum	100%													
4.03.05.3.02.0001	Fasilitas Rencanan Hukum		Berkas/buku	Jumlah Rencana Hukum Yang Efektif dan Baik	30 Rencanan	2,500,000,000	Fasilitas Rencanan Hukum	Berkas/buku	Jumlah Rencana Hukum Yang Efektif dan Baik	30 Rencanan	2,500,000,000	Kemendagri No. 4551/2009 Tahun 2023											
4.03.05.3.02.0002	Fasilitas Rencanan Hukum		Berkas/buku	Jumlah Rencana Hukum Yang Efektif dan Baik	3,2 Rencanan	490,000,000	Fasilitas Rencanan Hukum	Berkas/buku	Jumlah Rencana Hukum Yang Efektif dan Baik	3,2 Rencanan	500,000,000	Kemendagri No. 4551/2009 Tahun 2023											
TOTAL PASUKAN ANGGARAN						30,790,000,000	TOTAL PASUKAN ANGGARAN						32,368,740,000										

Tabel T- C.31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan												
Unit Organisasi :	SEKRETARIAT DAERAH											
Sub Unit Organisasi :	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI											
No	Rancangan Awal RKPD Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Hasil Analisis Kebutuhan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Catatan Penting	
(1)	(2)	(3)	(4)	Target Capaian SATUAN	(6)	(7)	(8)	(9)	Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp. 000)	(11)	(12)	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	BANJARBARU	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Kesekretariatan	100	Punt	1,079,216,300	BANJARBARU	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Kesekretariatan	100 Punt	1,079,216,300	Program Rutin Pendukung Kelancaran Pelaksanaan Tugas.	
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BANJARBARU	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang baik	100	%	205,062,400	BANJARBARU	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang baik	100%	205,062,400	Pentingnya Kegiatan Rutin Kantor yang tersedia untuk kelancaran Rumah Tangga Biro Pem dan Otda.	
4.01.01.4.01.01.00101.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BANJARBARU	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen	67,317,000	BANJARBARU	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 Dokumen	67,317,000	Sub Kegiatan Rutin pendukung fasilitas kelancaran pelaksanaan tugas Biro Pem dan Otda.	
4.01.01.4.01.01.00101.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BANJARBARU	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Laporan	137,745,400	BANJARBARU	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	137,745,400	Sub Kegiatan Rutin pendukung kelengkapan penyusunan Laporan Kinerja Biro Pem dan Otda.	
4.01.01.1.08	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BANJARBARU	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang baik	100	%	605,789,000	BANJARBARU	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang baik	100	605,789,000	Pentingnya Kegiatan Rutin Kantor yang tersedia untuk kelancaran Rumah Tangga Biro Pem dan Otda.	
4.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BANJARBARU	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	38,179,000	BANJARBARU	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	38,179,000	Sub Kegiatan Rutin pendukung Logistik kantor dan kelengkapan data dukung administrasi.	
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BANJARBARU	Persentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi SKPD	12	Laporan	567,610,000	BANJARBARU	Persentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi SKPD	12 Laporan	567,610,000	Sub Kegiatan Rutin pendukung rakor dan pelaksanaan tugas rutin serta kelengkapan administrasi.	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BANJARBARU	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang baik	100	%	268,364,900	BANJARBARU	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang baik	100%	268,364,900	Pentingnya Kegiatan Rutin Kantor yang tersedia untuk kelancaran Rumah Tangga Biro Pem dan Otda.	
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BANJARBARU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	268,364,900	BANJARBARU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	268,364,900	Sub Kegiatan Rutin pendukung pelaksanaan tugas dan kelengkapan kantor.	
4.01.03.01.01	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN	BANJARBARU	Meningkatkan perumusan kebijakan Bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja	100	%	3,962,692,000	BANJARBARU	Meningkatkan perumusan kebijakan Bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja	100%	3,962,692,000	Kegiatan Teknis Penunjang Capaian Kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.	
4.01.03.01.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan.	BANJARBARU	1.Persentase Potensi Kerja Sama yang direalisasikan	75%	%	1,225,355,600	BANJARBARU	1.Persentase Potensi Kerja Sama yang direalisasikan	75%	1,225,355,600	Pentingnya Kegiatan Teknis Pelaksanaan Tugas Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan untuk pemenuhan capaian target dan indikator Kinerja yang ditetapkan.	
			2. Status LPPD Provinsi Kalimantan Selatan	Tinggi				2. Status LPPD Provinsi Kalimantan Selatan	Tinggi			
			3.Persentase Bidang Pemerintahan yang ditindaklanjuti stakeholders.	100%	%			3.Persentase Bidang Pemerintahan yang ditindaklanjuti stakeholders.	100%			
			4. Nilai SKMIRK	80	Point			4. Nilai SKMIRK	80			
			5. Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan, dan Kerja Sama Daerah dengan tingkat capaian hasil Outcome (100%)	100%	%			5. Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan, dan Kerja Sama Daerah dengan tingkat capaian hasil Outcome (100%)	100%			
			6. Inovasi Biro Pemerintahan yang ditindaklanjuti	1	Inovasi			6. Inovasi Biro Pemerintahan yang ditindaklanjuti	1			
4.01.01.4.01.01.00103.01.01	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan.	BANJARBARU	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	12	Dokumen	320,355,600	BANJARBARU	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	12	320,355,600	*****	
4.01.01.4.01.01.00103.01.02	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum.	BANJARBARU	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pemerintahan Umum	3	Dokumen	270,000,000	BANJARBARU	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pemerintahan Umum	3	270,000,000	Sub Kegiatan Teknis fasilitas/mediasi/rekomendasi Bidang Pemerintahan Umum, penyelesaian sengketa/konflik pertanahan, dan Penyelesaian Laporan PSD di Kalsel.	
4.01.01.4.01.01.00103.01.03	Fasilitasi Penataan Wilayah	BANJARBARU	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Wilayah	10	Dokumen	635,000,000	BANJARBARU	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Wilayah	10	635,000,000	Sub Kegiatan Teknis Penegasan Batas Daerah, Pembinaan Kabupaten/Kota di Kalsel, Peningkatan kualitas pengawasan Penataan Wilayah di Kalsel, dan Pengaman Rupa Bumi (Toponimi) di Kalsel.	
4.01.03.01.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah.	BANJARBARU	1.Persentase Potensi Kerja Sama yang direalisasikan	100%	%	1,355,422,000	BANJARBARU	1.Persentase Potensi Kerja Sama yang direalisasikan	100%	1,355,422,000	Pentingnya Kegiatan Teknis Pelaksanaan Otonomi Daerah pada Bagian Otonomi Daerah untuk pemenuhan capaian target dan indikator Kinerja yang ditetapkan.	
			2. Status LPPD Provinsi Kalimantan Selatan	Tinggi				2. Status LPPD Provinsi Kalimantan Selatan	Tinggi			
			3.Persentase Bidang Pemerintahan yang ditindaklanjuti stakeholders.	100%	%			3.Persentase Bidang Pemerintahan yang ditindaklanjuti stakeholders.	100%			
			4. Nilai SKMIRK	80	Point			4. Nilai SKMIRK	80			
			5. Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan, dan Kerja Sama Daerah dengan tingkat capaian hasil Outcome (100%)	100%	%			5. Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan, dan Kerja Sama Daerah dengan tingkat capaian hasil Outcome (100%)	100%			
4.01.01.4.01.01.00103.02.01	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	BANJARBARU	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	10	Dokumen	400,422,000	BANJARBARU	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	10	400,422,000	*****	
4.01.01.4.01.01.00103.02.02	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	BANJARBARU	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	10	Dokumen	475,000,000	BANJARBARU	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	10	475,000,000	*****	
4.01.01.4.01.01.00103.02.03	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	BANJARBARU	Jumlah Hasil Laporan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	10	Laporan	480,000,000	BANJARBARU	Jumlah Hasil Laporan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	10	480,000,000	*****	
4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerjasama Daerah.	BANJARBARU	Meningkatnya Kerja Sama di Kalimantan Selatan dengan pihak terkait yang disepakati dalam MoU.	100	%	1,381,914,400	BANJARBARU	Fasilitasi Kerjasama Daerah.	100%	1,381,914,400	Pentingnya Kegiatan Teknis Fasilitas Kerja Sama Daerah pada Bagian Kerja Sama untuk pemenuhan capaian target dan indikator Kinerja yang ditetapkan.	
4.01.01.4.01.01.00103.03.01	Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah.	BANJARBARU	Jumlah Kerja Sama antar Pemerintah yang di Fasilitasi	270	Dokumen	631,317,600	BANJARBARU	Jumlah Kerja Sama antar Pemerintah yang di Fasilitasi	270	631,317,600	Sub Kegiatan Teknis pelaksanaan dan pemetaan kerja sama antar Pemerintah, baik Pemerintah Daerah Dalam dan Luar Negeri dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Monitoring Kerja Sama antar Pemerintah yang ditindaklanjuti yang diselesaikan.	
4.01.01.4.01.01.00103.03.02	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta.	BANJARBARU	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang di Fasilitasi	200	Dokumen	443,788,000	BANJARBARU	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang di Fasilitasi	200	443,788,000	Sub Kegiatan Teknis pelaksanaan dan pemetaan kerja sama Badan Usaha/Swasta, baik Badan Usaha/Swasta Dalam dan Luar Negeri dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Monitoring Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang ditindaklanjuti yang diselesaikan.	
4.01.01.4.01.01.00103.03.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama.	BANJARBARU	Jumlah Kerja Sama yang di Evaluasi	10	Laporan	306,808,800	BANJARBARU	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama.	10	306,808,800	*****	
						5,041,908,300				5,041,908,300		

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Unit Organisasi : Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : Biro Pengadaan Barang dan Jasa

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Kesekretariatan	100 Point	2.021.515.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Kesekretariatan	100 Point	2.021.515.000	
4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100%	14.512.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100%	14.512.000	
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang disusun	8 Dok	14.512.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang disusun	8 Dok	14.512.000	
4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	36.020.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	36.020.000	
4	01	01	1.02	05	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 dok	36.020.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 dok	36.020.000	
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	Persentase Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	100%	113.500.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	Persentase Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	100%	113.500.000	
4	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	246 paket	113.500.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	246 paket	113.500.000	
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	Persentase Kepuasan terhadap layanan Kesekretariatan	100%	1.039.283.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	Persentase Kepuasan terhadap layanan Kesekretariatan	100%	1.039.283.000	
4	01	01	1.06	04	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi SKPD	Semua Kabupaten/Kota,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	2 laporan	340.916.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi SKPD	Semua Kabupaten/Kota,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	2 laporan	340.916.000	
4	01	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	Jumlah dokumen kinerja dan penatausahaan perencanaan, keuangan dan kepegawaian yang disusun	12 Dok	698.367.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	Jumlah dokumen kinerja dan penatausahaan perencanaan, keuangan dan kepegawaian yang disusun	12 Dok	698.367.000	
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	Persentase Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	100%	412.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	Persentase Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	100%	412.000.000	
4	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa	13 unit/buah	412.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa	13 unit/buah	412.000.000	
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	Terlaksananya Kegiatan penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik (Biro Pengadaan Barang dan Jasa)	100%	406.200.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	Terlaksananya Kegiatan penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik (Biro Pengadaan Barang dan Jasa)	100%	406.200.000	

4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	Terbayarnya Rekening Jasa Komunikasi/ Internet Tiap Bulan	12 Bulan	406.200.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	Terbayarnya Rekening Jasa Komunikasi/ Internet Tiap Bulan	12 Bulan	406.200.000	
---	----	----	------	----	---	---	---	----------	-------------	---	---	---	----------	-------------	--

4	01	07			PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa	-	7.195.696.100	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa	-	7.195.696.100	
							Predikat Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	75 (baik)				Predikat Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	75 (baik)		
							Nilai Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Skor 87 (sangat memuaskan)				Nilai Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Skor 87 (sangat memuaskan)		
							Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	25%				Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	25%		
4	01	07	1.01		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	Persentase proses PBJ Prov.Kalsel yang sesuai ketentuan perundang-undangan dan tepat waktu; Persentase pengadaan barang dan jasa dengan hasil evaluasi bebas mark up;	100% ; 100% ;	1.447.346.000	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	Persentase proses PBJ Prov.Kalsel yang sesuai ketentuan perundang-undangan dan tepat waktu; Persentase pengadaan barang dan jasa dengan hasil evaluasi bebas mark up;	100% ; 100% ;	1.447.346.000	
4	01	07	1.01	01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	Jumlah laporan hasil strategi pengadaan barang dan jasa	2 laporan	548.151.000	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	Jumlah laporan hasil strategi pengadaan barang dan jasa	2 laporan	548.151.000	
4	01	07	1.01	02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	12 laporan	499.136.000	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	12 laporan	499.136.000	
4	01	07	1.01	03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa	12 laporan	400.059.000	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa	12 laporan	400.059.000	
4	01	07	1.02		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	Persentase pemenuhan LPSE sesuai peraturan perundang-undangan; Rasio gangguan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang dapat diselesaikan	100%; Rasio 0,8	2.620.999.100	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	Persentase pemenuhan LPSE sesuai peraturan perundang-undangan; Rasio gangguan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang dapat diselesaikan	100%; Rasio 0,8	2.620.999.100	
4	01	07	1.02	01	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	Jumlah laporan pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik	12 laporan	1.071.022.000	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	Jumlah laporan pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik	12 laporan	1.071.022.000	
4	01	07	1.02	02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	Jumlah laporan pengembangan sistem informasi pengadaan barang dan jasa	12 laporan	699.994.500	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	Jumlah laporan pengembangan sistem informasi pengadaan barang dan jasa	12 laporan	699.994.500	
4	01	07	1.02	03	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	Jumlah laporan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa	12 laporan	849.982.600	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	Jumlah laporan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa	12 laporan	849.982.600	
4	01	07	1.03		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	Persentase ketersediaan SDM Pengadaan Barang dan Jasa yang berkualitas dan bersertifikat PBJ ; Persentase pelayanan administrasi Tata usaha Biro; Persentase Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) di kabupaten kota dengan tingkat kematangan minimal Level 3 ; Presentase terpenuhinya layanan permasalahan pengadaan barang dan jasa	66,67% ; 100% 30% ; 100%	3.127.351.000	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	Persentase ketersediaan SDM Pengadaan Barang dan Jasa yang berkualitas dan bersertifikat PBJ ; Persentase pelayanan administrasi Tata usaha Biro; Persentase Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) di kabupaten kota dengan tingkat kematangan minimal Level 3 ; Presentase terpenuhinya layanan permasalahan pengadaan barang dan jasa	66,67% ; 100% 30% ; 100%	3.127.351.000	
4	01	07	1.03	01	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa	45 org	1.286.278.500	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa	45 org	1.286.278.500	
4	01	07	1.03	02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	Jumlah laporan hasil penataan kelembagaan pengadaan barang dan jasa	12 laporan	632.350.000	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	Jumlah laporan hasil penataan kelembagaan pengadaan barang dan jasa	12 laporan	632.350.000	
4	01	07	1.03	03	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa	12 laporan	1.208.722.500	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa	12 laporan	1.208.722.500	
TOTAL PAGU ANGGARAN									9.217.211.100	TOTAL PAGU ANGGARAN				9.217.211.100	

2.4 Penelaahan Usulan Program Kegiatan (2.5)

Program dan kegiatan yang dirumuskan dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025, merupakan hasil analisis sesuai kebutuhan. Rumusan berdasarkan hasil Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi pelaksanaan Program tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya.

Program dan Kegiatan merupakan analisis dan penelaahan Usulan pemangku kepentingan mau pun Pemerintahan Desa/Kampung dan Kelurahan Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan ke Provinsi maupun hasil pengumpulan informasi dan pengamatan pelaksanaan hasil pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota dan Rapat

Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 disajikan pada Tabel sebagai berikut :

Tabel T- C.32

**USULAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Unit Organisasi :

Sub Unit Organisasi : Biro Kesejahteraan Rakyat

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Banjarbaru	Indeks Kepuasan Terhadap layanan Kesekretariatan	100 Point	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Banjarbaru	Persentase Target Capaian Kinerja Biro	100%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Banjarbaru	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Banjarbaru	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	12 Laporan	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Banjarbaru	Persentase Target Capaian Kinerja Biro	100%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Banjarbaru	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Banjarbaru	Persentase Target Capaian Kinerja Biro	100%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Banjarbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	
	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Banjarbaru	Tingkat Kondusifitas Kerukunan Umat Beragama	74,3	
			Persentase Peningkatan Pengumpulan Zakat, Infad, dan Sadakah (ZIS) dari Badan Amil Zakat (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan	35%	
			NILAI IKM	90	
			Jumlah Inovasi yang dicanangkan	1	
	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Banjarbaru	Persentase Kegiatan Bina Mental Spritual Yang Difasilitasi	100%	
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Banjarbaru	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritua yang Dikelola	320 Unit	Pokok-Pokok Pikiran DPRD Prov.Kalsel, Usulan Lembaga, Badan, Yayasan dan Organisasi Kemasyarakatan
	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Banjarbaru	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	200 Lembaga	Pokok-Pokok Pikiran DPRD Prov.Kalsel, Usulan Lembaga, Badan, Yayasan dan Organisasi Kemasyarakatan

	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Banjarbaru	Persentase Kab/kota yang Melaksanakan urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Sesuai IKK	100%	
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Banjarbaru	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	13 Dokumen	Pokok-Pokok Pikiran DPRD Prov.Kalsel, Usulan Lembaga, Badan, Yayasan dan Organisasi Kemasyarakatan
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Banjarbaru	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	13 Dokumen	
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Banjarbaru	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	13 Dokumen	
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Banjarbaru	Persentase Kab/kota Yang Melaksanakan urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Sesuai IKK	100%	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Banjarbaru	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	13 Dokumen	Pokok-Pokok Pikiran DPRD Prov.Kalsel, Usulan Lembaga, Badan, Yayasan dan Organisasi Kemasyarakatan
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Banjarbaru	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	13 Dokumen	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Banjarbaru	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	13 Dokumen	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integral dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional. Dalam RPJMN 2020-2024 dimana terdapat 7 Agenda Prioritas Pembangunan diantaranya yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Sejalan dan Mempertimbangkan hal – hal Tersebut di atas, maka tema pembangunan daerah untuk RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 adalah

: “Pemantapan Daya Saing dan Kualitas Sarana Prasana untuk

mendukung Pembangunan Gerbang Logistik Kalimantan”

Sejalan dengan Tema RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 202 Maka ada 6 arah Prioritas Daerah :

1. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata
2. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saing

3. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi
4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi
5. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah

Tujuan Renja Sekretariat Daerah

Untuk mewujudkan misi-misi sebagaimana telah dirumuskan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagai berikut :

A. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

1. Meningkatkan penyelesaian sengketa batas daerah/ wilayah, sengketa dan/ konflik pertanahan, penataan wilayah, pembinaan daerah, Percepatan Penyelesaian Personil, Aset dan Dokumentasi (P3D), dan penamaan rupa bumi (*toponimi*), Pemerintahan Umum, dan pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dan Otonomi Daerah.
2. Meningkatkan kerja sama antar Pemerintah, Luar Negeri, Badan Usaha/ Swasta, monitoring dan evaluasi kerja sama di Kalimantan Selatan.
3. Meningkatkan Fasilitasi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan DPRD, Pemberhentian Antar Waktu (PAW), Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan (Lembaga Legislatif, Instansi Vertikal), dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan (EPD) Kalimantan Selatan.

4. Meningkatkan Pengelolaan dan Pelayanan administrasi kesekretariatan (perkantoran, rumah tangga Biro, administrasi kepegawaian, perencanaan dan penganggaran, keuangan dan penatausahaan, inventarisasi barang dan aset, kearsipan, pengendalian dan pengawasan internal, surat menyurat serta pelaporan) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dan Otonomi Daerah.

B. Biro Hukum

1. Tersedianya Produk Hukum Daerah (Provinsi Dan Kabupaten / Kota Serta Produk Hukum Lainnya) Yang Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Kepentingan Umum, Aspirasi Masyarakat Dan Perkembangan Pembangunan Daerah;
2. Tersedianya Bantuan Hukum Kepada Pemerintah Daerah Dan Masyarakat Miskin Serta Informasi Hukum;
3. Mewujudkan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Tersedianya Sarana Dan Prasarana Hukum Yang Memadai Guna Peningkatan Pelayanan Informasi Hukum; dan
5. Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Perkantoran.

C. Biro Administrasi Pembangunan

1. Meningkatkan pengkoordinasian kebijakan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah sumber dana APBD dan APBN
2. Meningkatkan Fasilitasi instansi terkait dalam Penyelesaian permasalahan pelaksanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Meningkatkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pembangunan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan Pembangunan Daerah
4. Meningkatkan pengendalian pelaporan pelaksanaan pembangunan Daerah.

D. Biro Kesejahteraan Rakyat

1. Terwujudnya kehidupan beragama yang harmonis dan kondusif.
2. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan rakyat pelayanan dasar.
3. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar.
4. Meningkatkan pelayanan bantuan bidang kesejahteraan rakyat

E. Biro Perekonomian

1. Meningkatkan Perekonomian Daerah
2. Menurunnya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan.

F. Biro Administrasi Pimpinan

1. Terwujudnya pelayanan administrasi terhadap Pimpinan dilingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang berkualitas
2. Meningkatnya kualitas layanan informasi serta bahan/materi Pimpinan Provinsi Kalimantan Selatan
3. Terwujudnya pelayanan keprotokolan terhadap Pimpinan dilingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan standar pelayanan
4. Terbangunnya opini publik yang positif terhadap Pimpinan di Media Massa.

G. Biro Organisasi

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih (indeks RB)

H. Biro Umum

1. Meningkatkan pelayanan terhadap Stakeholder Eksternal dan Internal Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Meningkatkan pengelolaan perencanaan, keuangan dan asset Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Meningkatkan pelayanan kerumah tanggaan pada Pimpinan dan SOPD, Instansi, Tamu, Ormas serta Masyarakat;
4. Meningkatkan pelayanan dalam pengelolaan persuratan dan arsip serta administrasi kepegawaian yang baik di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

I. Biro Pengadaan Barang/Jasa

1. Menetapkan langkah-langkah strategis atau acuan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2025-2029 dengan mengintegrasikan kegiatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa dengan mempertimbangkan secara matang faktor-faktor potensi, peluang dan kendala/hambatan yang dihadapi dalam upaya pencapaian tujuan antara lain
2. Meningkatkan Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Meningkatkan Kualitas Layanan Pengadaan Secara Elektronik Provinsi Kalimantan Selatan

Sasaran Renja Sekretariat Daerah

A. Biro Organisasi

1. Meningkatnya internalisasi Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah
2. Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Pemda.
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.
4. Terbentuknya Kelembagaan yang tepat Fungsi dan Tepat Ukuran.
5. Terevaluasinya Organisasi yang berbasis kinerja.
6. Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap Prosedur dan Tatakerja.
7. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.

B. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

1. Meningkatkan Perumusan Kebijakan Bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama.
2. Meningkatkan pembinaan OPD Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten / Kota terhadap Evaluasi Pemerintahan Daerah (EPD) Kalimantan Selatan.

C. Biro Hukum

1. Meningkatnya Kualitas Mutu Produk Hukum Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Maupun Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Melalui Proses

Fasilitasi, Harmonisasi, Sinkronisasi, Koreksi, Telaahan, Evaluasi, Dan Pembatalan Produk Hukum.

2. Menurunnya Produk Hukum Daerah Yang Menghambat Pembangunan, Menghambat Birokrasi, Bertentangan Dengan Peraturan Yang Lebih Tinggi, Tumpang Tindih Dengan Peraturan Perundang-Undangan Serta Berbenturan Dengan Kepentingan Masyarakat Dan Meningkatnya Simplifikasi Regulasi.
3. Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Bantuan Hukum Baik Kepada Pemerintah Daerah Maupaun Kepada Masyarakat Miskin Serta Tersebarluasnya Informasi Hukum Kepada Pemerintahan Maupun Masyarakat Umum Serta Terdokumentasinya Dokumen Produk Hukum Daerah Dengan Baik.
4. Meningkatnya Kepedulian dan Pemahaman Hak Asasi Manusia di Kalimantan Selatan.
5. Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Perkantoran.

D. Biro Administrasi Pembangunan

1. Meningkatnya Koordinasi dengan Instansi terkait dalam perumusan kebijakan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah sumber dana APBD dan APBN
2. Meningkatnya pengendalian data administrasi pelaksanaan pembangunan sumber dana APBD dan APBN pada instansi terkait pada lingkup Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Kalimantan Selatan.
3. Meningkatnya Fasilitasi instansi terkait dalam rangka pengkajian masalah untuk Penyelesaian permasalahan pelaksanaan pembangunan daerah
4. Meningkatnya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pembangunan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan Pembangunan Daerah
5. Meningkatnya tertib administrasi pelaporan pelaksanaan pembangunan Daerah.

F. Biro Kesejahteraan Rakyat

1. Meningkatnya nilai-nilai keagamaan
2. Meningkatnya toleransi antar umat beragama.
3. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap bantuan bidang keagamaan, pendidikan, olahraga dan kebudayaan.
4. Meningkatnya sinkronisasi kebijakan kesejahteraan rakyat bidang pendidikan, sosial, dan kesehatan
5. Meningkatnya sinkronisasi kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan, pariwisata, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi dan tenaga kerja, komunikasi, informasi, statistik, persandian, dan perhubungan.

G. Biro Perekonomian

1. Meningkatnya investasi yang berdampak kedaerah
2. Meningkatnya pendapatan masyarakat

H. Biro Umum

1. Peningkatan persentase pelayanan terhadap Stakeholder Eksternal dan Internal Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Peningkatan pengelolaan perencanaan, keuangan dan asset Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Peningkatan pelayanan kerumah tanggaan pada Pimpinan dan SOPD, Instansi, Tamu, Ormas serta Masyarakat;
4. Peningkatan pelayanan dalam pengelolaan persuratan dan arsip serta administrasi kepegawaian yang baik di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

I. Bidang Administrasi Pimpinan

1. Meningkatnya opini publik yang positif terhadap pimpinan di media massa

3. Meningkatnya dokumentasi dan publikasi pemberitaan melalui media cetak, elektronik, online dan kerjasama media.
4. Meningkatnya kualitas pelayanan keprotokolan.
5. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama antar lembaga atau non lembaga Pemerintah atau Swasta serta sinergitas pelayanan keprotokolan antar perangkat daerah ditingkat Provinsi atau Kabupaten dan Kota sesuai dengan standar keprotokolan.

J. Biro Layanan Pengadaan Barang/Jasa

1. Meningkatnya efektifitas pengadaan barang dan jasa SKPD di provinsi Kalimantan Selatan
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik pengadaan barang dan jasa

3.3 Rencana Program dan Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah 2025 (Biro-Biro) **(BAB IV)**

Program merupakan kumpulan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Untuk setiap program ditetapkan satu atau beberapa indikator hasil program beserta target- targetnya untuk mengukur tingkat keberhasilan.

Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk mencapai program dan tujuan organisasi. Penentuan kegiatan dalam suatu program berdasarkan keterkaitan logis bahwa keberhasilan kegiatan akan mendukung tercapainya program.

Pada Tahun 2025, Sekretariat Daerah merencanakan Program dan kegiatan dari 9 biro dengan total pagu sebesar Rp. Program dan kegiatan tersebut merupakan program dan kegiatan prioritas yang sedianya akan menjadi dasar pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah dalam rangka penyusunan kebijakan serta pencapaian target kinerja pada tahun 2023.

Program dan Kegiatan tersebut diformulasikan berdasarkan perkiraan kebutuhan pada tahun 2025 dan kemudian menjadi bahan pembahasan pada

proses perencanaan selanjutnya. Tidak menutup kemungkinan ada penambahan atau pengurangan, baik anggaran maupun jumlah/nama kegiatan. Namun program dan kegiatan tersebut adalah Program dan Kegiatan Prioritas yang disusun oleh masing-masing pelaksana kegiatan sesuai dengan perkiraan kebutuhan pada tahun 2025.

Mengacu kepada RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2021 - 2026 dan RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 - 2026, maka program dan kegiatan di Provinsi Kalimantan Selatan TA. 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		SEKRETARIAT DAERAH						147.106.007.229,00							169.171.908.312,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						147.106.007.229,00							169.171.908.312,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						147.106.007.229,00							169.171.908.312,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	147.106.007.229,00						-	169.171.908.312,00	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	347.389.400,00			-	-	-	-	399.497.810,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				16 Laporan	347.389.400,00	Kota Banjarbaru, Cempaka, Cempaka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		399.497.810,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	65.060.963.400,00			-	-	-	-	97.843.107.910,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				316 Orang/ Bulan	82.923.400.000,00	Kota Banjarbaru, Cempaka, Cempaka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		95.361.910.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi/ Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	1.717.666.800,00	Kota Banjarbaru, Cempaka, Cempaka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.975.316.820,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				12 Laporan	115.689.200,00	Kota Banjarbaru, Cempaka, Cempaka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		133.042.580,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				12 Dokumen	324.207.400,00	Kota Banjarbaru, Cempaka, Cempaka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		372.838.510,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	602.500.000,00			-	-	-	-	692.875.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakutan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				12 Paket	602.500.000,00	Kota Banjarbaru, Cempaka, Cempaka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		692.675.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	13.827.671.100,00			-	-	-	-	15.901.821.765,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	322.562.000,00	Kota Banjarbaru, Cempaka, Cempaka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		370.946.300,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	408.616.500,00	Kota Banjarbaru, Cempaka, Cempaka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		469.908.975,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	1.594.273.500,00	Kota Banjarbaru, Cempaka, Cempaka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.833.414.525,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	691.130.000,00	Kota Banjarbaru, Cempaka, Cempaka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		794.799.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	665.000.000,00	Kota Banjarbaru, Cempaka, Cempaka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		764.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	10.146.089.100,00	Kota Banjarbaru, Cempaka, Cempaka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		11.668.002.465,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	22.410.969.284,00			-	-	-	-	25.772.614.676,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	35.413.000,00	Kota Banjarbaru, Cempaka, Cempaka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		40.724.950,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	7.871.467.784,00	Kota Banjarbaru, Cempaka, Cempaka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		9.052.187.951,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	2.600.000.000,00	Kota Banjarbaru, Cempaka, Cempaka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.990.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	11.904.088.500,00	Kota Banjarbaru, Cempaka, Cempaka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		13.689.701.775,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	15.517.735.000,00			-	-	-	-	17.845.395.250,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertzinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Pertzinannya				200 Unit	6.761.129.000,00	Kota Banjarbaru, Cempaka, Cempaka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		7.775.298.350,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				17 Unit	6.430.816.000,00	Kota Banjarbaru, Cempaka, Cempaka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		7.395.438.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				23 Unit	2.325.790.000,00	Kota Banjarbaru, Cempaka, Cempaka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.674.658.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-			-	9.318.779.045,00			-	-	-	-	10.716.595.901,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	9.318.779.045,00	Kota Banjarbaru, Cempaka, Cempaka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.716.595.901,00	SEKRETARIAT DAERAH
		J U M L A H						147.106.007.229,00							169.171.908.312,00	

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BIRO ORGANISASI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BIRO ORGANISASI						5.676.147.100,00							6.243.751.810,00	
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						5.676.147.100,00							6.243.751.810,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						5.676.147.100,00							6.243.751.810,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	2.052.028.700,00						-	2.257.221.570,00	
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	-	-			-	834.577.400,00			-	-	-	-	918.025.140,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi/ Peraturan Perundang-Uhdangan				46 Orang	206.412.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		227.053.860,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				46 Orang	628.164.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		690.971.280,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	737.810.300,00			-	-	-	-	811.591.330,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	238.434.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		262.277.950,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	37.220.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		40.942.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi/ SKPD				2 Laporan	462.155.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		508.371.380,00	BIRO ORGANISASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	479.641.000,00			-	-	-	-	527.605.100,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	479.641.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		527.605.100,00	BIRO ORGANISASI
2.	4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	-	-			-	3.624.118.400,00						-	3.986.530.240,00	
	4.01.02.1.01	Facilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	-	-			-	1.278.483.300,00			-	-	-	-	1.406.331.630,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.01.0001	Facilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	811.792.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		892.971.750,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.01.0002	Facilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	225.040.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		247.544.880,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.01.0003	Penataan Analisis Jabatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan				4 Dokumen	241.650.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		265.815.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02	Facilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	-	-			-	2.345.635.100,00			-	-	-	-	2.580.198.610,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				1 Dokumen	376.945.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		414.641.040,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja														
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja				1 Dokumen	502.570.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		552.827.550,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja				1 Laporan	282.146.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		310.361.040,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.0004	Pengelolaan Tatakelaksana Pemerintahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan				1 Dokumen	891.796.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		980.976.480,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik				1 Dokumen	292.175.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		321.392.500,00	BIRO ORGANISASI
	J U M L A H							5.676.147.100,00							6.243.751.810,00	

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH						4.554.822.100,00							4.854.707.500,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						4.554.822.100,00							4.854.707.500,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						4.554.822.100,00							4.854.707.500,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	948.684.500,00						-	1.022.207.500,00	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	174.290.200,00			-	-	-	-	217.207.500,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	57.207.500,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		67.207.500,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	117.082.700,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	509.169.500,00			-	-	-	-	530.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	26.801.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		30.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	482.368.000,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		500.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	265.224.900,00			-	-	-	-	275.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	265.224.900,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		275.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
2.	4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	-	-			-	3.606.137.500,00						-	3.832.500.000,00	
	4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	-	-			-	1.130.140.800,00			-	-	-	-	1.187.500.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4.01.03.1.01.0001		Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan				12 Dokumen	338.743.600,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		348.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4.01.03.1.01.0002		Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum				3 Dokumen	229.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		239.500.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4.01.03.1.01.0003		Fasilitasi Penataan Wilayah														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah				10 Dokumen	561.897.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		600.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	-	-			-	1.163.182.000,00			-	-	-	-	1.290.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4.01.03.1.02.0001		Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD				2 Dokumen	340.358.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		350.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4.01.03.1.02.0002		Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan				1 Dokumen	414.823.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		440.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4.01.03.1.02.0003		Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan				1 Laporan	136.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4.01.03.1.02.0004		Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Evaluasi/ Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				49 Perangkat Daerah	136.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4.01.03.1.02.0005		Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Fasilitasi/ Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				49 Perangkat Daerah	136.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4.01.03.1.03		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	-	-			-	1.312.814.700,00			-	-	-	-	1.355.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4.01.03.1.03.0001		Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah														
			Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi				54 Dokumen	558.761.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		570.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4.01.03.1.03.0002		Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta														
			Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi				40 Dokumen	388.293.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		400.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4.01.03.1.03.0003		Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama														
			Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi				2 Laporan	365.760.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		385.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
J U M L A H								4.554.822.100,00							4.854.707.500,00	

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT						87.356.300.000,00							101.040.000.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						87.356.300.000,00							101.040.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						87.356.300.000,00							101.040.000.000,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Layanan Kesejahteraan	-			100 Poin	3.056.300.000,00						-	2.950.000.000,00	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peredikat SAKIP Tingkat Maturitas SPIP Perangkat Daerah	-			90.01 Poin 3 Level	606.300.000,00			Memperku t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	-	Biro Kesejahteraan Rakyat	-	710.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	156.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua 1 Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	-	Biro Kesejahteraan Rakyat		200.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua 1 Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	-	Biro Kesejahteraan Rakyat		160.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				3 Data	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05. Peningk atan Tata Kelola Pem erintahan Yang Fokus pada Pelayanan Publik	Biro Kesejahteraan Rakyat		350.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Tingkat Maturitas SPIP Perangkat Daerah	-			90.01 Poin 3 Level	150.000.000,00			Memperku at Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milienial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	-	Biro Kesejahteraan Rakyat	-	60.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	-	Biro Kesejahteraan Rakyat		60.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peredikat SAKIP Tingkat Maturitas SPIP Perangkat Daerah	-			90.01 Poin 3 Level	1.950.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	-	ASN Biro Kesejahteraan Rakyat	-	1.970.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	550.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	-	ASN Biro Kesejahteraan Rakyat		220.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Biro Kesejahteraan Rakyat		250.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	1.200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Keselaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	-	ASN Biro Kesejahteraan Rakyat		1.500.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peredikat SAKIP Tingkat Maturitas SPIP Perangkat Daerah	-			90.01 Poin 3 Level	350.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Keselaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	-	ASN Biro Kesejahteraan Rakyat	-	250.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	-	ASN Biro Kesejahteraan Rakyat		250.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
2.	4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Peningkatan Pengumpulan Zakat Infaq dan Sadakah (ZIS) Pada Badan Amil Zakat(BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Terapkan Indeks Pelayanan Publik Indeks Kerukunan Umat Beragama Indeks Kepuasan Masyarakat	-			10 % 1 Inovasi 4.0 Poin 74.7 Poin 95 Poin	84.300.000.000,00						-	98.050.000.000,00	
	4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Bina Mental Spritual Persentase Fasilitasi Rumusan Kebijakan Yang Menghasilkan Kebijakan Bidang Bina Mental Spritual Persentase Sarana dan Prasana dan Lembaga Bidang Bina Mental Spritual Yang difasilitasi	-			95 Poin 100 % 100 %	62.000.000.000,00			Memperku a t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Agama dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	-	Organisasi, Lembaga, dan Instansi Terkait	-	70.000.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.04.1.01.0001		Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola				300 Unit	40.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a1 Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	-	Organisasi, Lembaga, dan Instansi Terkait		45.000.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.04.1.01.0002		Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual														
			Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi				200 Lembaga	22.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a1 Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	-	Organisasi, Lembaga, dan Instansi Terkait		25.000.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesra Pelayanan Dasar Persentase Hasil Koordinasi Dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar Yang diimplementasikan	-			95 Poin 100 %	21.300.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	-	Organisasi, Lembaga, dan Instansi Terkait	-	26.850.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.02.0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan				1 Dokumen	20.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	-	Organisasi, Lembaga, dan Instansi Terkait		25.000.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.02.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan				1 Dokumen	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat 1 Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	-	Organisasi, Lembaga, dan Instansi Terkait		1.500.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.04.1.02.0003		Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial				1 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat 1 Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	-	Organisasi, Lembaga, dan Instansi Terkait		350.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesra Non Pelayanan Dasar Persentase Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang diimplementasikan	-			95 Poin 100 %	1.000.000.000,00			Memperkuat 1 Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	-	Organisasi, Lembaga, dan Instansi Terkait	-	1.200.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata				1 Dokumen	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat 1 Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	-	Organisasi, Lembaga, dan Instansi Terkait		500.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja				1 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	-	Organisasi, Lembaga, dan Instansi Terkait		350.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.03.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan				0 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	-	Organisasi, Lembaga, dan Instansi Terkait		350.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
			J U M L A H					87.356.300.000,00							101.040.000.000,00	

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BIRO HUKUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BIRO HUKUM						6.769.954.100,00							9.609.954.100,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						6.769.954.100,00							9.609.954.100,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						6.769.954.100,00							9.609.954.100,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Kesekretariatan	-			100 Point	2.019.478.900,00						-	3.659.478.900,00	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Tingkat Maturitas SPIP	-			90,01 Point 3 Level	676.746.700,00			-	-	ASN/PPPK/Tenaga Kontrak Dan Tamu Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	-	976.746.700,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	161.774.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN/PPPK/Tenaga Kontrak Dan Tamu Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan		261.774.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	214.972.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN/PPPK/Tenaga Kontrak Dan Tamu Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan		414.972.700,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				2 Data	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05. Peningk atan Tata Kelola Pem erintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik	ASN/PPPK/Tenaga Kontrak Dan Tamu Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan		300.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Tingkat Maturitas SPIP	-			90,01 Point 3 Level	52.467.200,00			-	-	-	-	72.467.200,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	52.467.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		72.467.200,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Tingkat Maturlitas SPIP	-			90,01 Point 3 Level	978.293.000,00			-	-	ASN/PPPK/Tenaga Kontrak Dan Tamu Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	-	2.198.293.000,00	BIRO HUKUM
4.01.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	392.448.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN/PPPK/Tenaga Kontrak Dan Tamu Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan		592.448.000,00	BIRO HUKUM
4.01.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	64.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN/PPPK/Tenaga Kontrak Dan Tamu Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan		84.250.000,00	BIRO HUKUM
4.01.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	521.595.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN/PPPK/Tenaga Kontrak Dan Tamu Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan		1.521.595.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	311.972.000,00			-	-	-	-	411.972.000,00	BIRO HUKUM
4.01.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	311.972.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		411.972.000,00	BIRO HUKUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase Produk Hukum Daerah Berkualitras Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan Yang Dimanfaatkan Oleh Pemerimah Daerah	-			100 %	4.750.475.200,00						-	5.950.475.200,00	
	4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	undefined	-			undefined undefined	3.056.621.200,00			-	-	ASN/PPPK/Tenaga Kontrak Dan Tamu Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	-	3.656.621.200,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan														
			Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun				60 Dokumen	1.325.393.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN/PPPK/Tenaga Kontrak Dan Tamu Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan		1.625.393.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan														
			Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun				500 Dokumen	295.187.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN/PPPK/Tenaga Kontrak Dan Tamu Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan		295.187.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.01.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasinya				500 Dokumen	674.658.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN/PPPK/Tenaga Kontrak Dan Tamu Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan		774.658.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.01.0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota														
			Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi				130 Dokumen	761.383.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN/PPPK/Tenaga Kontrak Dan Tamu Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan		961.383.200,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	-	-			-	1.693.854.000,00			-	-	ASN/PPPK/Tenaga Kontrak Dan Tamu Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	-	2.293.854.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.02.0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum														
			Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan				12 Kasus	1.363.590.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN/PPPK/Tenaga Kontrak Dan Tamu Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan		1.863.590.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.02.0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Masalah Non Litigasi/ dan HAM yang Diselesaikan				12 Kasus	330.264.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN/PPPK/Tenaga Kontrak Dan Tamu Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan		430.264.000,00	BIRO HUKUM
			J U M L A H					6.769.954.100,00							9.609.954.100,00	

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BIRO PEREKONOMIAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BIRO PEREKONOMIAN						3.092.660.600,00							3.424.864.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						2.295.943.100,00							2.550.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						2.295.943.100,00							2.550.000.000,00	
1.	4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-	-			-	2.295.943.100,00						-	2.550.000.000,00	
	4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Prosentase Analisis Ekonomi/ yang Ditindaklanjuti	-			100 %	466.226.400,00			Melanjutka n Pengemba ngan infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromart m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	-	Biro Perekonomian, SKPD, dan Stakeholder terkait	-	550.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.06.1.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro				12 Dokumen	215.599.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemba ngan infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromart m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	-	Biro Perekonomian, SKPD, dan Stakeholder terkait		250.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.06.1.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro				12 Dokumen	250.626.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromart m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	-	Biro Perekonomian, SKPD, dan Stakeholder terkait		300.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Prosentase Analisis Sumber Daya Alam yang Ditindaklanjuti	-			100 %	675.089.300,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromart m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	-	Biro Perekonomian, SKPD, dan Stakeholder terkait	-	800.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
4.01.06.1.02.0001		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA, OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				12 Dokumen	182.472.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromart di Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	-	Biro Perekonomian, SKPD, dan Stakeholder terkait		250.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
4.01.06.1.02.0002		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup				12 Dokumen	231.182.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromart di Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	-	Biro Perekonomian, SKPD, dan Stakeholder terkait		250.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
4.01.06.1.02.0003		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air				12 Dokumen	261.434.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromanufaktur Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	-	Biro Perekonomian, SKPD, dan Stakeholder terkait		300.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Persentase BUMD dan BLUD yang Sehat Prosentase BUMD dan BLUD yang sehat	-			100 % 0 %	1.154.627.400,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromanufaktur Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	-	Biro Perekonomian, SKPD, dan Stakeholder terkait	-	1.200.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
4.01.06.1.03.0001		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha				12 Dokumen	492.499.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromart m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	-	Biro Perekonomian, SKPD, dan Stakeholder terkait		500.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.06.1.03.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi				12 Dokumen	292.493.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromart m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	-	Biro Perekonomian, SKPD, dan Stakeholder terkait		300.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.06.1.03.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah				12 Dokumen	369.634.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromanif m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	-	Biro Perekonomian, SKPD, dan Stakeholder terkait		400.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	X	NON URUSAN						796.717.500,00							874.864.000,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						796.717.500,00							874.864.000,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	796.717.500,00						-	874.864.000,00	
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang baik	-			100 %	234.864.000,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromanif m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	-	Biro Perekonomian, SKPD, dan Stakeholder terkait	-	234.864.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	X.XX.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi/ Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	234.864.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausaha aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromanti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	-	Biro Perekonomian, SKPD, dan Stakeholder terkait		234.864.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi/ Umum Perangkat Daerah Yang Baik	-			100 %	438.493.500,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausaha aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromanti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	-	Biro Perekonomian, SKPD, dan Stakeholder terkait	-	475.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	X.XX.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	8.720.900,00	Kota Banjarbaru, Cempaka, Cempaka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromanti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	-	Biro Perekonomian, SKPD, dan Stakeholder terkait		10.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	11.605.600,00	Kota Banjarbaru, Cempaka, Cempaka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromanti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	-	Biro Perekonomian, SKPD, dan Stakeholder terkait		15.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi/ SKPD				12 Laporan	418.167.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromanti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	-	Biro Perekonomian, SKPD, dan Stakeholder terkait		450.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Baik	-			100 %	113.462.000,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromanti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	-	Biro Perekonomian, SKPD, dan Stakeholder terkait	-	150.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	113.462.000,00	Kota Banjarbaru, Cempaka, Cempaka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromarit m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	-	Biro Perekonomian, SKPD, dan Stakeholder terkait		150.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Baik	-			100 %	9.898.000,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromarit m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	-	Biro Perekonomian, SKPD, dan Stakeholder terkait	-	15.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	X.XX.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	9.898.000,00	Kota Banjarbaru, Cempaka, Cempaka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromarit m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	-	Biro Perekonomian, SKPD, dan Stakeholder terkait		15.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	J U M L A H							3.092.660.600,00							3.424.864.000,00	

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN						8.959.637.300,00							10.180.000.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						8.959.637.300,00							10.180.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						8.959.637.300,00							10.180.000.000,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan Indeks Pelayanan Publik Indeks Kepuasan Masyarakat	-			1 Inovasi 4,53 Poln 55 Poln	7.476.380.300,00						-	8.430.000.000,00	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Pelayanan Tata Usaha Biro	-			100 %	6.901.193.000,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromart m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	-	Unit Kerja/Instansi Terkait Lingkup Provinsi Kalsel dan Kab/Kota Provinsi Kalimantan Selatan	-	7.500.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	6.901.193.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromart m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	-	Unit Kerja/Instansi Terkait Lingkup Provinsi Kalsel dan Kab/Kota Provinsi Kalimantan Selatan		7.500.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Pelayanan Tata Usaha Biro	-			100 %	317.751.300,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromanti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	-	Unit Kerja/Instansi Terkait Lingkup Provinsi Kalsel dan Kab/Kota Provinsi Kalimantan Selatan	-	550.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	109.611.300,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromanti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	-	Unit Kerja/Instansi Terkait Lingkup Provinsi Kalsel dan Kab/Kota Provinsi Kalimantan Selatan		150.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	207.940.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromanif m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	-	Unit Kerja/Instansi Terkait Lingkup Provinsi Kalsel dan Kab/Kota Provinsi Kalimantan Selatan		400.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Pelayanan Tata Usaha Biro	-			100 %	232.936.000,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromanif m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	-	Unit Kerja/Instansi Terkait Lingkup Provinsi Kalsel dan Kab/Kota Provinsi Kalimantan Selatan	-	350.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	232.936.000,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromartili m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	-	Unit Kerja/Instansi Terkait Lingkup Provinsi Kalsel dan Kab/Kota Provinsi Kalimantan Selatan		350.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Pelayanan Tata Usaha Biro	-			100 %	24.500.000,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromartili m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	-	Unit Kerja/Instansi Terkait Lingkup Provinsi Kalsel dan Kab/Kota Provinsi Kalimantan Selatan	-	30.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				34 Unit	24.500.000,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Mengan gkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromanif estruktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Mengan gkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromanif estruktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Mengan gkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromanif	-	Unit Kerja/Instansi Terkait Lingkup Provinsi Kalsel dan Kab/Kota Provinsi Kalimantan Selatan		30.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
2.	4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase Permasalahan Pembangunan Daerah yang Dapat Diselesaikan	-			95 %	1.483.257.000,00						-	1.750.000.000,00	
	4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi/ Pelaksanaan Pembangunan Wilayah Persentase Rekomendasi masalah pelaksanaan pembangunan daerah dan wilayah sumber dana APBD dan APBN yang ditindaklanjuti oleh stakeholder Persentase Rekomendasi masalah pelaksanaan pembangunan wilayah yang ditindaklanjuti stakeholder	-			1 Laporan 100 % 100 %	1.033.257.000,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Mengan gkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromanif estruktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Mengan gkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromanif	-	Unit Kerja/Instansi Terkait Lingkup Provinsi Kalsel dan Kab/Kota Provinsi Kalimantan Selatan	-	1.150.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.08.1.01.0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi/ Pelaksanaan Pembangunan APBD				1 Laporan	303.257.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromarit m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	-	Unit Kerja/Instansi Terkait Lingkup Provinsi Kalsel dan Kab/Kota Provinsi Kalimantan Selatan		350.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.08.1.01.0002	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi/ Pelaksanaan Pembangunan APBN				1 Laporan	280.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromansi m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	-	Unit Kerja/Instansi Terkait Lingkup Provinsi Kalsel dan Kab/Kota Provinsi Kalimantan Selatan		300.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.08.1.01.0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi/ Pelaksanaan Pembangunan Wilayah				3 Laporan	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Mengan gkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromarit m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	-	Unit Kerja/Instansi Terkait Lingkup Provinsi Kalsel dan Kab/Kota Provinsi Kalimantan Selatan		500.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Permasalahan Pembangunan Daerah yang Dianalisa dan Dirumuskan Sebagai Bahan Kebijakan Pembangunan Daerah	-			100 %	450.000.000,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Mengan gkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromarit m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	-	Unit Kerja/Instansi Terkait Lingkup Provinsi Kalsel dan Kab/Kota Provinsi Kalimantan Selatan	-	600.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4.01.08.1.02.0001		Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan				3 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	-	Unit Kerja/Instansi Terkait Lingkup Provinsi Kalsel dan Kab/Kota Provinsi Kalimantan Selatan		200.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.08.1.02.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah				1 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	-	Unit Kerja/Instansi Terkait Lingkup Provinsi Kalsel dan Kab/Kota Provinsi Kalimantan Selatan		200.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.08.1.02.0003	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah				1 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Mene mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromanis m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	-	Unit Kerja/Instansi Terkait Lingkup Provinsi Kaltel dan Kab/Kota Provinsi Kalimantan Selatan		200.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	J U M L A H							8.959.637.300,00						10.180.000.000,00		

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN						16.976.041.000,00							18.765.108.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						16.976.041.000,00							18.765.108.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						16.976.041.000,00							18.765.108.000,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	16.976.041.000,00						-	18.765.108.000,00	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	110.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	ASN Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov. Kaltel	-	115.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	ASN Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov. Kaltel		115.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	150.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik	ASN Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov. Kaltel	-	152.500.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi/ Pelaksanaan Tugas ASN				24 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	05. Peningk atan Tata Kelola Pem erintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik	ASN Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov. Kalsel		152.500.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.374.053.000,00			-	05. Peningk atan Tata Kelola Pem erintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik	-	-	614.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				29 Paket	604.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05. Peningk atan Tata Kelola Pem erintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik	-		604.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	770.053.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05. Peningk atan Tata Kelola Pem erintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik	-		10.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	800.602.000,00			-	05. Peningk atan Tata Kelola Pem erintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik	ASN Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov. Kalsel	-	801.602.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	682.602.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05. Peningk atan Tata Kelola Pem erintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik	ASN Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov. Kalsel		682.602.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	118.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	-	ASN Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov. Kalsel		119.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	21.450.000,00			-	05. Peningk atan Tata Kelola Pem erintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik	-	-	22.180.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				11 Unit	21.450.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05. Peningk atan Tata Kelola Pem erintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik	-		22.180.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Meningkatnya Kualitas Bahan Materi dan Komunikasi Pimpinan	-			100 %	12.190.410.000,00			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	-	Pimpinan Daerah atau yang Mewakil i, Publik, Pers, Organisasi, Lembaga dan SKPD/Instansi Terkait	-	14.343.710.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.13.0001	Penyilapan Mater Pimpinan														
			Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan				12 Dokumen	418.710.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkotika, Judi dan Penyeludupan	-	Pimpinan Daerah atau yang Mewakill, Publik, Pers, Organisasi, Lembaga dan SKPD/Instansi Terkait		518.710.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				12 Laporan	2.385.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik	Pimpinan Daerah atau yang Mewakill, Publik, Pers, Organisasi, Lembaga dan SKPD/Instansi Terkait		2.625.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.13.0003	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan				12 Laporan	9.385.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik	Pimpinan Daerah atau yang Mewakill, Publik, Pers, Organisasi, Lembaga dan SKPD/Instansi Terkait		11.200.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	Persentase Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Keprotokolan	-			100 %	2.329.526.000,00			-	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik	Pimpinan Daerah atau yang Mewakill, Publik, Pers, Organisasi, Lembaga dan SKPD/Instansi Terkait	-	2.716.116.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara				12 Laporan	649.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik	Pimpinan Daerah atau yang Mewakill, Publik, Pers, Organisasi, Lembaga dan SKPD/Instansi Terkait		1.019.700.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.14.0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				12 Laporan	701.826.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05. Peningk atan Tata Kelola Pem erintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik	Pimpinan Daerah atau yang Mewakil, Publik, Pers, Organisasi, Lembaga dan SKPD/Instansi Terkait		801.826.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.14.0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan				12 Laporan	777.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku at Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	-	Pimpinan Daerah atau yang Mewakil, Publik, Pers, Organisasi, Lembaga dan SKPD/Instansi Terkait		894.590.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	J U M L A H							16.976.041.000,00							18.765.108.000,00	

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA						8.504.870.619,00							8.775.619.500,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						8.504.870.619,00							8.775.619.500,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						8.504.870.619,00							8.775.619.500,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Kesekretariatan	-			100 Point	2.347.285.500,00						-	2.417.450.000,00	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-			100 %	10.180.000,00			-	-	-	-	12.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	10.180.000,00	Kota Banjarbaru, Cempaka, Cempaka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		12.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang baik	-			100 %	36.658.000,00			-	-	-	-	38.500.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				4 Dokumen	36.658.000,00	Kota Banjarbaru, Cempaka, Cempaka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		38.500.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase pengadaan pakalan khusus hari-hari tertentu	-			100 %	96.000.000,00			-	-	-	-	96.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				210 Paket	96.000.000,00	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Antasan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		96.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi	-			100 %	954.647.500,00			-	-	-	-	960.950.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	340.920.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		340.950.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	613.727.500,00	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		620.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertaksananya kegiatan pengadaan peralatan	-			100 %	447.000.000,00			-	-	-	-	500.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	447.000.000,00	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Antasan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		500.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang baik	-			100 %	802.800.000,00			-	-	-	-	810.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	802.800.000,00	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar Kota Banjarmasin, Banjarmasin Timur, Pemurus Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		810.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
2.	4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan Indeks pelayanan publik Jumlah inovasi pelayanan publik pengadaan barang dan jasa yang diterapkan Predikat Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nilai Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	-			30 % 4.1 Nilai 4 aplikasi/fitur 90 Point 95 Point	6.157.585.119,00						-	6.358.169.500,00	
	4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase belanja yang dilakukan melalui pengadaan Persentase pengadaan barang dan jasa dengan hasil evaluasi bebas mark up Persentase proses pengadaan barang dan jasa provinsi Kalimantan selatan yang sesuai ketentuan perundang-undangan dan tepat waktu	-			100 % 100 % 100 %	1.339.571.000,00			-	-	-	-	1.447.287.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.01.0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa				2 Laporan	531.735.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		548.151.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.01.0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa				12 Laporan	468.337.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		499.136.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa				12 Laporan	339.499.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		400.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase pemenuhan layanan pengadaan secara elektronik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku Persentase pemenuhan pelayanan publik Rasio gangguan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang dapat diselesaikan	-			100 % 100 % 0.8 Rasio	2.318.331.000,00			-	-	-	-	2.350.882.500,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.02.0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik				12 Laporan	800.741.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		810.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.02.0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				12 Laporan	676.702.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		699.994.500,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.02.0003	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				12 Laporan	840.888.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		840.888.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase SDM Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa yang berkompeten Persentase terpenuhinya layanan permasalahan pengadaan barang dan jasa Persentase UKPEJ Provinsi, Kabupaten/Kota dengan tingkat kematangan minimal level 3 Predikat Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Tingkat maturitas SPIP	-			88 % 100 % 92,85 % A Nilai 3 Level	2.499.683.119,00			-	-	-	-	2.560.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
	4.01.07.1.03.0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa															
			Jumlah Orang yang Mengikut Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa				40 Orang	852.883.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		860.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
	4.01.07.1.03.0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa															
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa				12 Dokumen	592.872.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		600.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
	4.01.07.1.03.0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa															
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa				12 Dokumen	1.053.928.119,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.100.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
		J U M L A H							8.504.870.619,00							8.775.619.500,00	

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BIRO UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BIRO UMUM						66.342.271.055,00						73.287.870.804,00		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						66.342.271.055,00							73.287.870.804,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						66.342.271.055,00							73.287.870.804,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	66.342.271.055,00						-	73.287.870.804,00	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang baik	-			100 %	1.654.081.930,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan	-	1.938.717.180,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	923.622.730,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan		1.062.166.140,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	730.459.200,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan		876.551.040,00	BIRO UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang baik	-			100 %	1.735.912.465,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Sekretariat Daerah dan Biro Umum	-	2.083.094.958,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	849.926.130,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Sekretariat Daerah dan Biro Umum		1.019.911.356,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				4 Dokumen	427.280.085,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Sekretariat Daerah dan Biro Umum		512.736.102,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	458.706.250,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkotika, Judi dan Penyeludupan	-	Sekretariat Daerah dan Biro Umum		550.447.500,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang baik	-			100 %	185.543.400,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkotika, Judi dan Penyeludupan	-	Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan	-	222.652.080,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	185.543.400,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkotika, Judi dan Penyeludupan	-	Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan		222.652.080,00	BIRO UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah Yang Baik	-			100 %	393.844.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Sekretariat Daerah dan Biro Umum	-	433.228.400,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan				17 Dokumen	335.960.680,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Sekretariat Daerah dan Biro Umum		369.556.748,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	57.883.320,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Sekretariat Daerah dan Biro Umum		63.671.652,00	BIRO UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Baik	-			100 %	861.818.980,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Sekretariat Daerah dan Biro Umum	-	948.000.878,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				16 Paket	66.420.750,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Sekretariat Daerah dan Biro Umum		73.062.825,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				8 Paket	66.511.500,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Sekretariat Daerah dan Biro Umum		73.162.650,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	407.209.330,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Sekretariat Daerah dan Biro Umum		447.930.263,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	208.600.900,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Sekretariat Daerah dan Biro Umum		229.660.990,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	112.676.500,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Sekretariat Daerah dan Biro Umum		124.164.150,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Baik	-			100 %	48.244.562.960,00			-	-	Sekretariat Daerah dan Biro Umum	-	53.069.019.256,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				57 Unit	35.671.357.700,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Sekretariat Daerah dan Biro Umum		39.238.493.470,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				14 Paket	3.747.458.660,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Sekretariat Daerah dan Biro Umum		4.122.204.526,00	BIRO UMUM
4.01.01.1.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				250 Unit	8.825.746.600,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Sekretariat Daerah dan Biro Umum		9.708.321.260,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Baik	-			100 %	284.900.000,00			-	-	Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan	-	313.390.000,00	BIRO UMUM
4.01.01.1.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	284.900.000,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan		313.390.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Baik	-			100 %	12.981.607.320,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Sekretariat Daerah dan Biro Umum	-	14.279.768.052,00	BIRO UMUM
4.01.01.1.09.0007		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				15000 Unit	4.085.869.700,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Sekretariat Daerah dan Biro Umum		4.494.456.670,00	BIRO UMUM
4.01.01.1.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				11 Unit	7.835.319.470,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Sekretariat Daerah dan Biro Umum		8.618.851.417,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				210 Unit	597.275.800,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Sekretariat Daerah dan Biro Umum		657.003.380,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah														
			Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi				10 Ha	463.142.350,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Sekretariat Daerah dan Biro Umum		509.456.585,00	BIRO UMUM
		J U M L A H						66.342.271.055,00						73.287.870.804,00		

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Kualitas tatakelola pemerintahan (good governance) adalah prasyarat tercapainya sasaran pembangunan daerah, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat, serta peningkatan kapasitas birokrasi melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Hal ini sejalan dengan salah satu prioritas pembangunan pemerintah saat ini yakni mewujudkan ***“Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Fokus Pada Pelayanan Publik.***

Untuk mencapai sasaran sesuai indikator sasaran yang telah ditetapkan, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan menyusun Rencana kerja tahun 2026 yang mana Program dan kegiatan yang dirumuskan diarahkan untuk mewujudkan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 - 2029 dan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025 – 2029.

Rencana Kerja Pagu Indikatif tahun 2025 sebesar **Rp 355.430.807.003,00-**, Pagu Indikatif tersebut di alokasikan untuk belanja Program dan Kegiatan, adapun rincian Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah Prov. Kalsel Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

SEKRETARIAT DAERAH

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Masukan input berupa dana **Rp 249.121.194.784,00-** dengan Indikator Program adalah Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Kesekretariatan dengan target realisasi sebesar 100 Point

2. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

Masukan input berupa dana **Rp 4.842.571.100,00-** dengan Indikator Program adalah Persentase Kualitas Produk Hukum Daerah Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan Yang Dimanfaatkan Pemerintah Daerah dan Persentase Keberhasilan Pendampingan Bantuan/Layanan Hukum (Litigasi & Non Litigasi) Pemerintah Daerah Dan Layanan Informasi Produk Hukum Yang Baik dengan target realisasi sebesar 100 %

3. Program Penataan Organisasi

Masukan input berupa dana **Rp 3.624.118.400,00-** dengan Indikator Program Persentase Kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran . Persentase PD yang melaksanakan Tata Laksana dengan "BAIK". Jumlah Unit Pelayanan Publik dengan Pelayanan Publik Prima (Nilai A) Persentase Perangkat Daerah yang berbasis kinerja

4. Program Kesejahteraan Rakyat

Masukan input berupa dana **Rp 84.300.000.000,00-** dengan Indikator Program adalah Tingkat Kondusifitas Kerukunan Umat Beragama, Persentase Peningkatan Pengumpulan Zakat, Infad, dan Sadakah (ZIS) dari Badan Amil Zakat (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan, NILAI IKM, Jumlah Inovasi yang dicanangkan

5. Program Pemerintah dan Otonomi Daerah

Masukan input berupa dana **Rp 3.606.137.500,00-** dengan Indikator Program adalah 1. Persentase perumusan kebijakan Pemerintahan, Otonomi

Daerah dan Kerja Sama dengan capaian outcome 100%, 1. Persentase Potensi Kerja Sama yang direalisasikan 2. Status LPPD Provinsi Kalimantan Selatan.

3. Persentase Kebijakan Bidang Pemerintahan yang ditindaklanjuti Stakeholder. 4. Nilai SKM/IKM. 5. Inovasi Biro Pemerintahan

6. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan

Masukan input berupa dana **Rp 1.483.257.000,00-** dengan Indikator Program adalah Persentase Permasalahan Pembangunan Daerah yang dapat Diselesaikan

7. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Masukan input berupa dana **Rp 6.157.585.119,00-** dengan Indikator Program adalah Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan

8. Program Perekonomian dan Pembangunan

Masukan input berupa dana **Rp 2.295.943.100,00-** dengan Indikator Program adalah 1. Prosentase BUMD yang Sehat 2. Prosentase BLUD yang Baik 3. Tingkat Inflasi yang Stabil

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 – 2029 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, merupakan acuan dan panduan bagi seluruh biro-biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Diharapkan Rencana Strategis (RENSTRA) ini dapat menjadi komitmen dan kesatuan dalam menentukan arah dan peran Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Kalimantan Selatan sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 – 2029 dan RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 – 2045. Selanjutnya dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) biro-biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan setiap tahunnya, sebagai pedoman dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Banjarbaru, 12 September 2025

Sekretaris Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan,



MUHAMMAD SYARIFUDDIN, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19671030 199412 1 003